

**PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, TENAGA KERJA, DAN DANA
ALOKASI BANTUAN PEMBANGUNAN TERHADAP KETIMPANGAN
PEMBANGUNAN EKONOMI PROVINSI LAMPUNG DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TAHUN 2012-2016**



SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) Dalam Ilmu Ekonomi
dan Bisnis Islam

Oleh :

FENI NURSETIANINGRUM

NPM: 1451010042

Jurusan: Ekonomi Syariah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H/2018 M**

**PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, TENAGA KERJA, DAN DANA
ALOKASI BANTUAN PEMBANGUNAN TERHADAP KETIMPANGAN
PEMBANGUNAN EKONOMI PROVINSI LAMPUNG DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TAHUN 2012-2016**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) Dalam Ilmu Ekonomi
dan Bisnis Islam

Oleh :

FENI NURSETIANINGRUM

NPM: 1451010042

Jurusan: Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Dr. Heni Noviarita, S.E., M.Si

Pembimbing II : Madnasir, S.E., M.Si

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H/2018 M**

ABSTRAK

Ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah dapat terjadi dalam proses pembangunan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Lampung yang diukur menggunakan Indeks Williamson terus mengalami kenaikan. Kondisi jumlah penduduk dan tenaga kerja yang meningkat setiap tahunnya belum bisa menjamin kesejahteraan masyarakat, dan dana alokasi bantuan pembangunan yang berfluktuatif belum bisa memenuhi pemerataan pembangunan daerah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pengaruh jumlah penduduk, tenaga kerja dan dana alokasi bantuan pembangunan berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Lampung dan dalam pandangan Perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pengaruh jumlah penduduk, tenaga kerja, dan dana alokasi bantuan pembangunan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Lampung dan dalam Perspektif Ekonomi Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan penelitian secara kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dalam periode pengamatan 2012-2016. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung.

Secara keseluruhan hasil analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa (Uji F) jumlah penduduk, tenaga kerja, dan dana alokasi bantuan pembangunan berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan ekonomi dengan hasil F hitung lebih besar dari F tabel ($8,241 > 2,81$) dan nilai sig. $0,000 < 0,05$. Serta secara parsial Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan t hitung lebih besar dari t tabel ($2,059 > 1,675$) serta nilai sig. ($0,032 < 0,05$), Tenaga Kerja berpengaruh dengan arah negatif dengan nilai t hitung lebih kecil dari t tabel ($-3,21 < 1,675$) serta nilai sig. ($0,002 < 0,005$) dan Dana Alokasi Bantuan Pembangunan berpengaruh signifikan t hitung lebih besar dari t tabel ($3,657 > 1,675$) serta nilai sig. ($0,000 < 0,05$).

Dalam perspektif Ekonomi Islam ketimpangan merupakan gambaran kesejahteraan perekonomian masyarakat dan setiap manusia wajib memberikan sedikit rezeki yang diperoleh agar distribusi pendapatan lebih merata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam Ekonomi Islam setiap muslim diharuskan untuk memenuhi kebutuhannya.

Kata kunci: Ketimpangan Pembangunan Ekonomi, Jumlah Penduduk, Tenaga Kerja, Dana Alokasi Bantuan Pembangunan, Ekonomi Islam.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : JL. H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung, Telp. ☎ (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengaruh Jumlah Penduduk, Tenaga Kerja, Dan Dana Alokasi Bantuan Pembangunan Terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2012-2016

Nama : Feni Nursetianingrum

Npm : 1451010042

Jurusan : Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam siding Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. Heni Noviarita, S.E., M.Si
NIP. 196511201992032002

Pembimbing II

Madnasir, S.E., M.Si
NIP. 197504242002121001

Mengetahui
Ketua Prodi Ekonomi Syariah

Madnasir, S.E., M.Si
NIP. 197504242002121001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Tlp. (0721)703289, 780421

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Pengaruh Jumlah Penduduk, Tenaga Kerja, Dan Dana Alokasi Bantuan Pembangunan Terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2012-2016”**, disusun oleh Nama : **Feni Nursetianingrum NPM. 1451010042, Jurusan Ekonomi Syariah**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: **Jumat, 8 Juni 2018.**

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Erike Anggraini, S.E., M.E.Sy. (.....)

Sekretaris : Linda Azizah, S. Ag. M. Ag. (.....)

Penguji I : Deki Fermansyah, S.E., M.Si. (.....)

Penguji II : Dr. Heni Noviarita, S.E., M.Si. (.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Moh Bahrudin, M.A

NIP. 195808241 98903 1 003

MOTTO

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya”. (Qs. Al-Hasyr: 7)¹



¹Dapartemen Agama RI, “Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Revisi”, (Surabaya: CV Mahkota, 1996), h. 546.

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kepada Rabb-ku, Dzat yang menganugerahkan akal dan iman kepada hambanya, sehingga dengan itu hambanya dapat mengerti makna dari syukur itu sendiri. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sebaik-baiknya teladan dalam menjalani kehidupan. Alhamdulillah, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan segala kerendahan hati dan hanya mengharap rida dari Allah SWT, penulis mempersembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Bapakku Hermawan Setia Agung dan Ibuku Aniati yang telah mendidik dan membesarkanku dengan do'a dan segenap jasa-jasanya yang tak terhingga demi keberhasilan cita-citaku, saya semakin yakin bahwa ridho Allah SWT adalah keridhoanmu.
2. Mbah Putriku yang selalu memberikan kasih sayang, perhatian, semangat dan do'a sehingga karya ini terselesaikan.
3. Adik-adik ku Desni Khoiriyah, Nurul Arifaf Istiqomah, Khoiron Ramadhan, Ahmad Fadil Kusuma, dan Ajeng Fatimah Azzahra yang menjadi semangatku untuk cepat menyelesaikan skripsi ini.

4. Untuk My Patner Nurwahid Juli Andrean yang sudah sabar menemani, membantu saya, memberi nasihat, memberi dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi saya dari awal hingga akhir pembuatan skripsi.
5. Untuk teman-teman terbaikku, Yunensi Rika Rosa Nova yang menemaniku mengerjakan skripsi hingga larut pagi, Istikomah yang suka aku repotkan dengan info kampus, dan Rizka Dwi Astuti, Unun Udia A'la, Veka Verliana, Fitria Ratna Wulan yang telah memberi dukungan, nasihat dan menyemangati di setiap waktunya.
6. Untuk teman seperjuangan pada saat Munaqosah Ramadhan, Deswandi dan Arini yang sangat berkesan dan membantuku pada tanggal 5-8 Juni 2018.



RIWAYAT HIDUP

Feni Nursetianingrum dilahirkan pada tanggal 20 Februari 1996 di Kelurahan Bulukarto, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu. Penulis merupakan putri pertama dari enam bersaudara, pasangan Bapak Hermawan Setia Agung dan Ibu Aniati. Penulis memulai jenjang pendidikannya di TK Aisyiyah II Pringsewu, lulus pada tahun 2002. Lalu melanjutkan di SD Negeri 1 Bulukarto dan lulus pada tahun 2008, setelah itu melanjutkan ke MTs Negeri Pringsewu dan lulus pada tahun 2011. Kemudian penulis melanjutkan sekolah ke SMA Negeri 2 Pringsewu, dan lulus pada tahun 2014.

Penulis melanjutkan jenjang pendidikan tingginya dan terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang dimulai dari semester I pada tahun 2014, hingga sekarang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Pengaruh Jumlah Penduduk, Tenaga Kerja, dan Dana Alokasi Bantuan Pembangunan Terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2012-2016. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai derajat Strata 1 Program Studi Ekonomi Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dengan penuh kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini tak mungkin dapat terselesaikan tanpa bantuan pihak-pihak terkait. Oleh karena itu izinkan penulis berterimakasih kepada mereka yang telah banyak membantu, membimbing, mendukung, menasihati, menghibur, dan menemani dalam menyelesaikan skripsi ini.

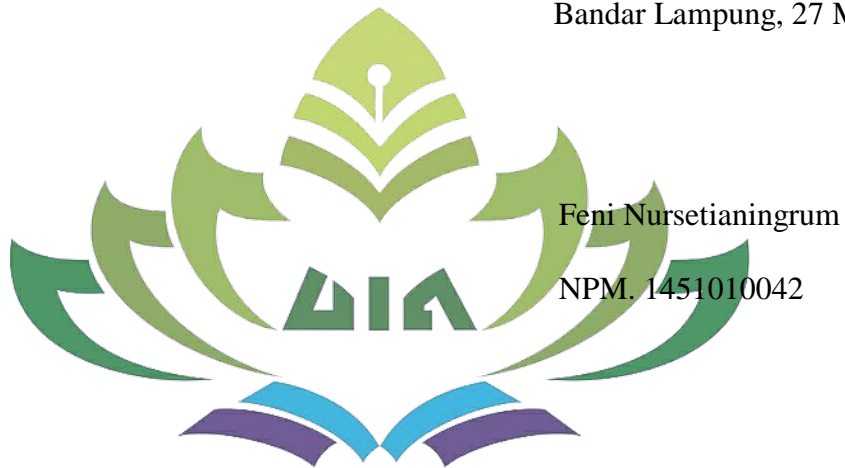
Sehubungan dengan hal tersebut penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.

2. Bapak Madnasir, S.E., M.Si., selaku ketua Jurusan Ekonomi Syari'ah sekaligus sebagai Pembimbing II, yang telah banyak memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis.
3. Ibu Dr. Heni Noviarita, S.E., M.Si., selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan serta motivasi kepada penulis dengan penuh kesungguhan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah menyalurkan segenap ilmunya dengan penuh keikhlasan.
5. Almamaterku Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
6. Ibu Risma Pijiyantini, selaku pengurus kepala bagian tata usaha BPS Provinsi Lampung yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di BPS Provinsi Lampung.
7. Semua teman-teman sekelasku, Ekonomi Syariah kelas F angkatan 2014. Maafkan kiranya mengkhianati gurauan kekeluargaan kita, yang pada semester awal kita semua pernah berharap bersama untuk bisa “masuk bareng, keluar bareng”, tapi ini bukan soal, sebab hakikatnya kita tak pernah saling meninggalkan. Aku selalu percaya, bahwa pendidikan bukanlah sebuah perlombaan dalam hidup, namun pendidikan adalah kehidupan itu sendiri.
8. Semua pihak yang mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Andai ada ungkapan yang maknanya melebihi terimakasih, kiranya itulah yang ingin kusampaikan.


Somoga amal kebaikan semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mohon kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap besar penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, masyarakat dan pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, 27 Mei 2018



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Batasan Masalah	12
E. Rumusan Masalah	13
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jumlah Penduduk	15
1. Pengertian Jumlah Penduduk	15
2. Dampak Jumlah Penduduk.....	16
3. Menentukan Laju Pertumbuhan Penduduk	18

4. Jumlah Penduduk Dalam Perpektif Islam	19
B. Tenaga Kerja	21
1. Pengertian Tenaga Kerja	21
2. Klasifikasi Tenaga Kerja	23
a. Berdasarkan Penduduk.....	24
b. Berdasarkan Batas Usia Kerja	24
c. Berdasarkan Kualitasnya	25
3. Tenaga Kerja Dalam Perspektif Islam	26
C. Dana Alokasi Bantuan Pembangunan	28
1. Dana Bagi Hasil (DBH)	30
2. Dana Alokasi Umum (DAU)	30
4. Dana Alokasi Khusus (DAK).....	31
5. Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Dalam Perspektif Ekonomi Islam	32
D. Indeks Williamson	34
E. Ketimpangan Ekonomi	35
1. Definisi Ketimpangan/ Kesenjangan Ekonomi.....	35
2. Kesenjangan Ekonomi Antar Daerah.....	36
3. Ketimpangan/Kesenjangan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam ..	38
F. Penelitian Terdahulu	41
G. Kerangka Pemikiran.....	43
H. Hipotesis.....	46

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	48
B. Sumber Data	49
C. Teknik Pengumpulan Data	50
D. Populasi Dan Sempel	50
E. Variabel Penelitian	52
1. Variabel Terikat	52
2. Variabel Bebas	54
F. Definisi Operasional Variabel.....	55
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	56
1. Uji Asumsi Klasik	57
2. Uji Hipotesis.....	60
3. Koefisien Determinasi (R^2)	61
4. Analisis Regresi Linier Berganda	62

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Hasil Penelitian	64
1. Gambaran Umum Objek Penelitian	64

2. Sejarah Provinsi Lampung	65
3. Geografi Provinsi Lampung	65
4. Sektor Ekonomi Provinsi Lampung	67
B. Analisis Data	68
1. Analisis Deskriptif	68
2. Hasil Uji Asumsi Klasik.....	73
3. Uji Hipotesis.....	79
4. Koefisien Determinasi.....	81
5. Analisis Regresi Linier Berganda	82
C. Pembahasan.....	85

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	105

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Lampung Tahun 2012 Sampai 2016	6
Tabel 1.2 PDRB Kabupaten Kota Se provinsi Lampung Atas Dasar Harga Konstan 2012 Sampai 2016 Menurut Lapangan Usaha	7
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel	55
Tabel 4.1 Tingkat Ketimpangan Pembangunan Di Provinsi Lampung Tahun 2012 Sampai 2016	69
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Di Provinsi Lampung Tahun 2012 Sampai 2016	71
Tabel 4.3 Jumlah Tenaga Kerja Di Provinsi Lampung Tahun 2012 Sampai 2016	72
Tabel 4.4 Dana Alokasi Bantuan Pembangunan Di Provinsi Lampung Tahun 2012 Sampai 2016	73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Perhitungan Indeks Williamson Kabupaten/Kota Provinsi Lampung
Tahun 2012-2016

Lampiran 2 Tabel Data Input SPSS

Lampiran 3 Kartu Konsultasi Skripsi

Lampiran 4 Surat Riset

Lampiran 5 SK Pembimbing Skripsi Mahasiswa Semester Genap Tahun
Akademik 2017/2018

Lampiran 6 Berita Acara Seminar Proposal Skripsi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini. Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kekeliruan terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah lain merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun judul skripsi ini adalah **“Pengaruh Jumlah Penduduk, Tenaga Kerja, dan Dana Alokasi Bantuan Pembangunan Terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2012-2016”**.

Maka terlebih dahulu ditegaskan hal-hal yang terkandung dalam judul tersebut sebagai berikut:

1. Jumlah Penduduk adalah penduduk atau warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹

¹Muhammad Iqbal, “Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Belanja Modal, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pada Pemerintah Daerah”. *JOM Fekon*, Vol. 4, No. 1 (Februari 2017), h. 886.

2. Tenaga Kerja adalah sebagian dari keseluruhan penduduk yang secara potensial dapat menghasilkan barang dan jasa.²
3. Dana Bantuan Pembangunan adalah berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah berupa Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum.
4. Ketimpangan adalah tidak seimbang, berat sebelah, atau kesenjangan.³
5. Pembangunan Ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi ditambah dengan perubahan berbagai aspek dalam kegiatan ekonomi.⁴
6. Perspektif adalah sudut pandang, pandangan.⁵
7. Ekonomi islam adalah suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka Syariah Islam.⁶

Berdasarkan uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah sebuah kajian mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam.

²Nindya Eka Sobita, I Wayan Suparta, "Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Lampung". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 3, No. 2 (Juli 2014), h.146.

³Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa", (Jakarta: Edisi Keempat, PT Gramedia, 2011). h. 1524.

⁴Sadono Sukirno, "Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan", Edisi 2, (Jakarta: Kencana, 2006). h. 10.

⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Loc. Cit.* h. 1062.

⁶Veithzal Rivai, "Islamic Economics, Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi", (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013). h. 1.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

- a. Sebagaimana diketahui jumlah penduduk di Provinsi Lampung pada tahun 2012-2016 yang terus mengalami peningkatan hal tersebut berarti mempercepat tekanan pada lahan pekerjaan.
- b. Keadaan tenaga kerja di Provinsi Lampung cenderung berfluktuatif yaitu pada tahun 2012-2014 mengalami peningkatan sedangkan pada tahun 2015 mengalami penurunan dan mengalami peningkatan pada tahun 2016.
- c. Pengalokasian Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum di Provinsi Lampung yang kurang merata, memberikan kontribusi yang menggambarkan keadaan perekonomian di Provinsi Lampung dalam keadaan kurang baik (data terlampir).
- d. Keadaan jumlah penduduk, tenaga kerja, dan dana alokasi bantuan pembangunan yang saling berkaitan untuk menggambarkan kondisi ketimpangan pembangunan yang terjadi di Provinsi Lampung.

2. Alasan Subyektif

- a. Judul yang diajukan sesuai dengan bidang keilmuan yang sedang penulis pelajari saat ini, yakni berhubungan dengan jurusan Ekonomi Syariah serta memberikan penambahan dalam mengembangkan wawasan, sehingga akan menambah literatur kajian.
- b. Memberikan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca tentang pengaruh Jumlah Penduduk, Tenaga Kerja, dan Dana Alokasi Bantuan Pembangunan

terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Lampung dan bagaimana konsep ketimpangan ekonomi ditinjau dari sudut pandang ekonomi umum serta pengentasannya menurut ekonomi Islam.

- c. Penelitian ini dirasa mampu untuk diselesaikan oleh penulis, mengingat adanya ketersediaan bahan literatur yang cukup memadai serta data dan informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian baik data sekunder dan data primer memiliki kemudahan akses serta akses letak objek penelitian mudah dijangkau oleh penulis.

C. Latar Belakang Masalah

Secara umum pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita atau pendapatan masyarakat meningkat dalam periode waktu yang panjang. Menurut Sen, pertumbuhan ekonomi tidak boleh dipandang sebagai tujuan, pembangunan harus lebih memperhatikan upaya peningkatan kualitas kehidupan dan kebebasan. Pemerataan pembangunan merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam menilai keberhasilan pembangunan di suatu negara.

Pembangunan adalah suatu proses yang multidimensional yang melibatkan berbagai perubahan-perubahan mendasar dalam struktur sosial, tingkah laku sosial, dan institusi sosial, di samping akselerasi pertumbuhan ekonomi, pemerataan ketimpangan pendapatan, serta pemberantasan kemiskinan. Maka tujuan dari

pembangunan itu sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁷ Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda-beda.

Pembangunan ekonomi adalah proses yang dapat menciptakan pendapatan riil perkapita sebuah Negara meningkat untuk periode jangka panjang dengan syarat, sejumlah orang hidup dibawah garis kemiskinan mutlak tidak naik, dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang.⁸ Kuznet mengemukakan bahwa tahap awal pertumbuhan ekonomi distribusi pendapatan cenderung memburuk atau yang lazim disebut dengan ketimpangan yang tinggi.⁹ Ketimpangan wilayah merupakan suatu aspek yang umum terjadi di setiap negara baik negara miskin, negara berkembang, bahkan negara maju memiliki masalah ketimpangan pembangunan antar wilayah maupun dengan ukuran yang berbeda-beda.

Menurut Neo Klasik ketimpangan wilayah terjadi karena setiap daerah memiliki perbedaan sumber daya, tenaga kerja dan teknologi.¹⁰ Akibat dari perbedaan tersebut kemampuan suatu daerah untuk mendorong proses pembangunan menjadi berbeda. Ketimpangan pembangunan pada prinsipnya merupakan ketimpangan ekonomi yang mengandung makna kemiskinan dan kesenjangan. Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional, persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Selain harus mampu

⁷Michael P. Todaro, Stephen C. Smith, "*Pembangunan Ekonomi Edisi 11*", (Jakarta: Erlangga 2011), h. 18-19.

⁸Robinson Tarigan, "*Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*", (Jakarta: Bumi Aksara 2004), h.48.

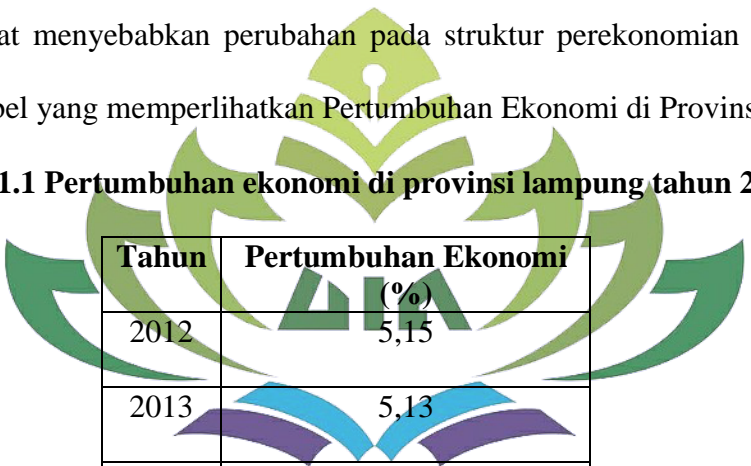
⁹Mudrajat Kuncoro, "*Otonomi dan Pembangunan Daerah*", (Jakarta: Erlangga 2004), h.70.

¹⁰Rahardjo Adisasmita, "*Teori-Teori Pembangunan Ekonomi*", (Yogyakarta: Graha Ilmu 2013), h. 58.

memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Wongdesmiati (2009) mengemukakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kemiskinan yaitu jumlah penduduk.¹¹ Pertumbuhan ekonomi merupakan syarat keharusan bagi pengurangan kemiskinan. Artinya, pertumbuhan ekonomi hendaklah menyebar di setiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin. Perekonomian yang semakin maju dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat menyebabkan perubahan pada struktur perekonomian di suatu daerah. Berikut tabel yang memperlihatkan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung:

Tabel 1.1 Pertumbuhan ekonomi di provinsi lampung tahun 2012-2016



Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2012	5,15
2013	5,13
2014	5,08
2015	5,77
2016	6,44

(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017)

Berdasarkan Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung Tahun 2012-2016 cenderung berfluktuatif dapat dilihat pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,15% dan mengalami penurunan pada tahun 2013 sebesar 5,13%.

¹¹Widya Ningsih Zebua, Djaimi Bakce, Syaiful Hadi, “Analisis Faktor-Faktor Dominan Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Riau”. *Jurnal Agribisnis Ekonomi*, Vol. 6, No. 2 (Desember 2015), h. 160.

Kemudian terjadi peningkatan pada tahun 2014 sebesar 5,08% hingga tahun 2016 mencapai 6,44%.

Meskipun Provinsi Lampung memiliki persentasi pertumbuhan ekonomi yang berfluktuatif Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi yang kaya akan potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan sesuai dengan kemampuan masyarakatnya, guna membantu meningkatkan pembangunan daerah. Pada umumnya pembangunan daerah difokuskan pada pembangunan ekonomi. Dalam rangka memajukan pembangunan ekonomi diperlukannya pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diukur dengan melihat PDRB dan laju pertumbuhannya atas dasar harga konstan.

Tabel 1.2 PDRB Kabupaten/Kota SeProvinsi Lampung Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha, 2012-2016 (Juta Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016
1	Lampung Barat	3.440.999	36.77.316	3.881.888	4.088.443	4.293.143
2	Tanggamus	7.470.391	7.975.618	8.445.977	8.910.245	9.371.969
3	Lampung Selatan	20.782.043	22.113.698	23.396.573	24.654.678	25.942.709
4	Lampung Timur	21.455.319	23.378.059	24.049.295	25.151.473	26.206.693
5	Lampung Tengah	32.702.372	34.815.762	36.794.367	38.773.799	40.950.574
6	Lampung Utara	11.333.804	12.065.942	12.765.479	13.458.839	14.145.712
7	Way Kanan	6.687.926	7.041.004	7.440.123	7.832.393	8.234.786
8	Tulang Bawang	10.827.945	11.559.174	12.199.160	12.811.520	13.505.401
9	Pesawaran	7.954.316	8.447.694	8.920.055	9.368.564	9.843.453
10	Pringsewu	5.367.487	5.712.839	6.041.409	6.356.989	6.677.199

11	Mesuji	5.361.408	5.831.304	6.605.670	7.313.339	8.114.595
12	Tulang bawang Barat	5.388.189	5.731.559	6.046.679	6.370.001	6.705.639
13	Pesisir Barat	2.165.799	2.274.506	2.402.314	2.520.889	2.654.781
14	Bandar Lampung	25.403.655	27.123.918	29.036.173	30.873.559	32.859.033
15	Metro	2.876.025	3.074.122	3.262.462	3.453.953	3.657.867
	Total Kabupaten / Kota	169.217.678	180.822.515	191.287.624	201.938.684	213.163.554
	Provinsi Lampung	170.769.207	180.620.008	189.789.999	199.536.099	209.807.186

(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa meski Provinsi Lampung mempunyai persentasi pertumbuhan ekonomi yang berfluktuatif tetapi Provinsi Lampung mempunyai PDRB per kapita yang terus meningkat setiap tahunnya. Dapat dilihat dalam tabel pada tahun 2012 PDRB Provinsi Lampung sebesar 170.769.207, dan selalu mengalami peningkatan hingga tahun 2016 sebesar 20.980.7186. Penyebab ketimpangan antar wilayah di Provinsi Lampung diantaranya adalah perbedaan kandungan sumber daya alam, sumber daya manusia dalam hal ini tenaga kerja, investasi yang berbeda-beda antar wilayah, mobilitas barang dan jasa, alokasi dana bantuan pembangunan anatar wilayah, dan konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah.

Pertumbuhan ekonomi yang cepat berdampak terhadap ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Implikasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan merata untuk mengembangkan kegiatan ekonomi meningkatnya infrastruktur, perusahaan semakin banyak dan berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi, dan teknologi

semakin meningkat. Sebagai implikasi dari perkembangan ini diharapkan kesempatan kerja akan bertambah, tingkat pendapatan meningkat, dan kemakmuran masyarakat semakin tinggi.¹²

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan diikuti dengan membaiknya taraf hidup sasaran yang dicapai pada umumnya adalah untuk mencapai tingkat pertumbuhan PDRB jauh lebih tinggi dibanding dengan laju pertumbuhan penduduk.¹³ Penduduk atau warga negara merupakan warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan perundang-undangan. Banyaknya jumlah penduduk di suatu daerah dapat mencerminkan pengalokasian anggaran dari pemerintah pusat untuk setiap daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing. Pemerintah daerah yang memiliki jumlah penduduk tinggi dituntut untuk melakukan pengendalian yang baik sebagai pertanggungjawaban kepada publik.¹⁴

Menurut Ademan dan Moris (2004) pertumbuhan penduduk yang tinggi menambah angka jumlah penduduk dan mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita, jumlah penduduk yang tinggi meski bukan penyebab utama keterbelakangan, merupakan faktor yang turut berkontribusi terhadap lambatnya pembangunan ekonomi di negara tertentu maupun di suatu wilayah.¹⁵ Jumlah penduduk bagi pemerintah daerah perencanaan pembangunan dipandang sebagai aset modal dasar pembangunan sekaligus juga beban pembangunan. Sebagai aset modal pembangunan

¹²Sadono Sukirno, “*Ekonomi Pembangunan*”, (Jakarta: Bima Grafika 2001), h. 48.

¹³Robinson Tarigan, *Op.Cit.* h. 82.

¹⁴Muhammad Iqbal, *Op.Cit.* h. 886-887.

¹⁵Kamal Idris, Syaparuddin, Siti Hodijah, “Perumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja, Kemiskinan, dan Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jambi”. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, Vol. 9, No.1 (April 2014), h. 48.

apabila dapat meningkatkan kualitas maupun keahlian sehingga akan meningkatkan produksi nasional. Jumlah penduduk besar akan menjadi beban jika struktur belanja daerah rendah.¹⁶

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi, tetapi lebih ditekankan pada efisiensi dan produktivitas dari penduduk tersebut. Jumlah penduduk yang terlalu banyak atau kepadatan penduduk yang tinggi akan menjadi penghambat pembangunan ekonomi di negara berkembang.¹⁷

Tujuan utama dari usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya harus pula menghapus dan mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran. Kesempatan kerja bagi penduduk atau masyarakat akan memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁸

Dalam penelitian Nur (2011) mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja mengelompokan Provinsi Lampung sebagai daerah yang mengalami hubungan yang tidak seimbang antara pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Dimana terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun dibarengi dengan pertumbuhan tenaga kerja yang rendah.¹⁹

¹⁶Andri Devita, Arman Delis, Junaidi, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi". *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, Vol. 2, No. 2 (Oktober 2014), h. 65.

¹⁷Suprianto, Binar Dwiyanto Pamungkas, Julia Zikriana, "Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2010-2015". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 14, No. 2 (Agustus 2017), h.190.

¹⁸Michael P. Todaro, "Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi 7", (Jakarta: Erlangga 2000), h. 58.

¹⁹Nindya Eka Sobita, I Wayan Suparta, *Op.Cit.* Vol. 3, No. 2 (Juli 2014), h. 142.

Berdasarkan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, “Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi”. Dana perimbangan terdiri dari bagi hasil pajak/bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana alokasi bantuan pembangunan daerah berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu sumber keuangan untuk melakukan pembangunan ekonomi daerah.

Dalam rangka meningkatkan pembangunan nasional harus didukung dengan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dalam rangka mewujudkan keserasian dan keseimbangan pembangunan nasional. Pembangunan ekonomi daerah lebih menekankan pada pendekatan daerah secara administratif dan pendekatan sektoral, yang diarahkan untuk mengembangkan dan menserasikan laju pertumbuhan antar daerah, antar perkotaan, antar perdesaan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan prioritas daerah serta pengembangan daerah seoptimal mungkin dengan memperhatikan dampak pembangunan.

Bagi daerah yang terlebih dulu membangun sudah tentu lebih banyak menyediakan sarana dan prasarana misalkan iklim usaha yang baik, jasa perbankan yang baik sehingga menarik minat investor untuk mengadakan investasi. Proses tersebut menunjukkan bahwa kesenjangan pembangunan antar daerah sebenarnya akibat dari proses pembangunan itu sendiri. Berdasarkan atas penyebab ketimpangan regional anatar wilayah dari tahun ketahun cenderung melebar maka dapat diambil

suatu dugaan, yakni ketimpangan pembangunan ekonomi yang dipengaruhi oleh Jumlah Penduduk, Tenaga Kerja dan Dana Alokasi Bantuan Pembangunan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Lampung dengan judul penelitian sebagai berikut **“Pengaruh Jumlah Penduduk, Tenaga Kerja, Dan Dana Alokasi Bantuan Pembangunan Terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2012-2016”**.

D. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, terarah, dan tidak meluas maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Yaitu hanya berkaitan dengan jumlah penduduk, tenaga kerja, dan dana alokasi bantuan pembangunan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Lampung tahun 2012-2016. Jumlah penduduk, tenaga kerja, dan dana alokasi bantuan pembangunan dipilih karena ketiga variabel ini paling signifikan pengaruhnya terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Lampung.

E. Rumusan Masalah

1. Apakah Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Lampung tahun 2012-2016?
2. Apakah Tenaga Kerja berpengaruh terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Lampung tahun 2012-2016?
3. Apakah Dana Alokasi Bantuan Pembangunan berpengaruh terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Lampung tahun 2012-2016?
4. Bagaimana Pandangan Ekonomi Islam terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Lampung tahun 2012-2016?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk terhadap tingkat Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Lampung tahun 2012-2016.
- b. Untuk mengetahui pengaruh Tenaga Kerja terhadap tingkat Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Lampung tahun 2012-2016.
- c. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Bantuan Pembangunan terhadap tingkat Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Lampung tahun 2012-2016.

- d. Untuk mendeskripsikan bagaimana pandangan Ekonomi Islam terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Lampung tahun 2012-2016.

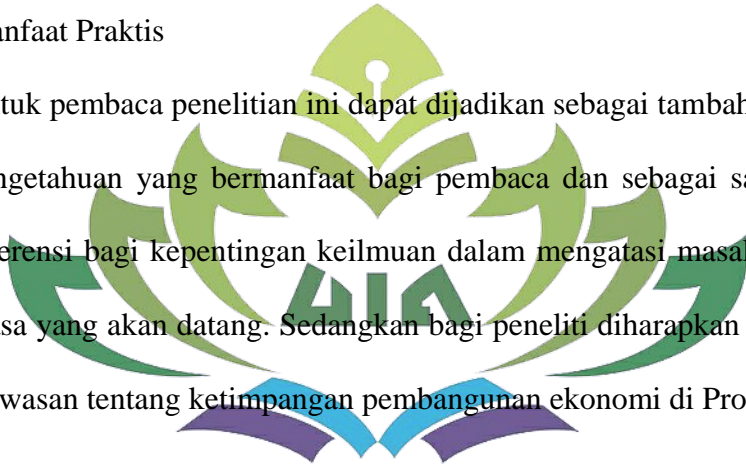
2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian ini yaitu agar menjadi tambahan literatur atau referensi dan menambah ilmu pengetahuan mengenai ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Lampung.

b. Manfaat Praktis

Untuk pembaca penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat bagi pembaca dan sebagai salah satu sumber referensi bagi kepentingan keilmuan dalam mengatasi masalah yang sama di masa yang akan datang. Sedangkan bagi peneliti diharapkan dapat menambah wawasan tentang ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Lampung.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jumlah Penduduk

1. Pengertian Jumlah Penduduk

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Sedangkan menurut Said (2001), yang dimaksud dengan penduduk adalah jumlah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil dari proses-proses demografi yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Simon dalam Todaro (2000) mengemukakan bahwa penduduk merupakan orang yang bertempat tinggal menetap dalam suatu wilayah. Pengaruh jumlah penduduk pada tingkat moderat pada dasarnya positif dan bermanfaat bagi pembangunan ekonomi, baik bagi negara-negara maju maupun yang sedang berkembang.

Pada umumnya perkembangan penduduk di negara sedang berkembang sangat tinggi dan besar jumlahnya. Dan masalah jumlah penduduk menyangkut kepentingan pembangunan serta kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. Dalam konteks pembangunan, pandangan terhadap penduduk terpecah dua, ada yang menganggapnya sebagai penghambat pembangunan, ada pula yang menganggap sebagai pemacu pembangunan. Todaro dan Smith (2006) menjelaskan bahwa ada

tujuh konsekuensi negatif dari jumlah penduduk, yakni berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, pendidikan, kesehatan, ketersediaan bahan pangan, lingkungan hidup, serta migrasi internasional, distribusi pendapatan, biasanya dapat didefinisikan di dalam kaitannya dengan tingkat rata-rata dari distribusi yang dimaksud.¹

2. Dampak Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk dalam konteks pembangunan mempengaruhi belanja daerah, jumlah penduduk yang besar bagi pemerintah daerah dipandang sebagai aset modal dasar pembangunan atau sebagai pemacu pembangunan tetapi sekaligus juga sebagai penghambat pembangunan.² Pertumbuhan penduduk adalah sebuah proses keseimbangan yang dinamis antara komponen kependudukan yang dapat menambah dan mengurangi jumlah penduduk.³ Yang menjadi permasalahan dalam pertumbuhan penduduk adalah pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dapat menimbulkan berbagai masalah dan hambatan dalam pembangunan ekonomi.⁴ Dengan keadaan yang demikian di mungkinkan pertumbuhan penduduk akan menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah jika dalam penanganannya tidak bisa dilakukan dengan efektif.

¹Suprianto, Binar Dwiyanto, Pamungkas, "Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan, Dan Kesehatan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2010-2015". *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 14, No. 2 (Agustus 2017), h. 190-191.

²Andri Devita, Arman Delis, Junaidi, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi". *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, Vol. 2, No. 2 (Desember 2014), h. 65.

³Mulyadi, "Ekonomi Sumberdaya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 15.

⁴Subandi, "Ekonomi Pembangunan", (Bandung: Alfa Beta, 2014), h. 99.

Jumlah penduduk yang terlalu banyak atau kepadatan penduduk yang terlalu tinggi akan menjadi penghambat pembangunan ekonomi di negara berkembang. Pendapatan per kapita yang rendah dan tingkat pembentukan modal yang rendah semakin sulit bagi negara berkembang untuk menopang ledakan jumlah penduduk. Sekalipun *output* meningkat sebagai hasil teknologi yang lebih baik dan pembentukan modal, peningkatan ini akan ditelan oleh jumlah penduduk yang terlalu banyak. Alhasil, tidak ada perbaikan dalam laju pertumbuhan perekonomian. Penduduk sebagai pemacu pembangunan karena populasi yang lebih besar sebenarnya adalah pasar potensial yang menjadi sumber permintaan akan berbagai macam barang dan jasa yang kemudian akan menggerakkan berbagai macam kegiatan ekonomi sehingga menciptakan skala ekonomi dalam produksi yang akan menguntungkan semua pihak, menurunkan biaya produksi dan menciptakan sumber pasokan atau penawaran tenaga kerja murah dalam jumlah yang memadai sehingga pada gilirannya akan merangsang output atau produksi agregat yang lebih tinggi lagi.

Dan pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang berarti tingkat kemiskinan akan turun. Selanjutnya dalam jangka panjang penduduk merupakan suatu keuntungan. Simon juga mencatat bahwa, pertumbuhan penduduk juga merangsang pembangunan ekonomi. Semakin besar jumlah penduduk akan mengakibatkan meningkatnya permintaan terhadap barang-barang konsumsi dan selanjutnya akan mendorong "*economic of scale*" dalam berproduksi, sehingga akan

menurunkan biaya produksi.⁵ Pemerintah Daerah yang memiliki jumlah penduduk banyak dituntut untuk melakukan pengendalian intern yang baik sebagai pertanggungjawaban kepada publik. Semakin besar ukuran pemerintahan semakin mudah untuk mendapatkan modal eksternal dalam jumlah yang lebih besar, sehingga investor tertarik untuk menanamkan modalnya pada pemerintahan tersebut. Hal ini dikarenakan setiap pemerintah daerah memiliki ukuran yang berbeda.⁶

David Ricardo berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang terlalu besar hingga 2 kali lipat bisa menyebabkan melimpahnya tenaga kerja. Tenaga kerja yang melimpah menyebabkan upah yang diterima menurun, di mana upah tersebut hanya bisa untuk membiayai tingkat hidup minimum (*subsistence level*). Pada taraf ini, perekonomian mengalami stagnasi (kemandekan) yang disebut *Stationary State*.⁷ Dengan keadaan seperti ini akan membuat pertumbuhan perekonomian di suatu wilayah akan melemah.

3. Menentukan Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu. Kegunaannya adalah memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa mendatang. Laju pertumbuhan penduduk geometrik

⁵Evi Andriani, Sri Indah Handayani, “Pengaruh PDRB Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merangin”. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol.8, No. 2 (Juli 2008), h. 2.

⁶Muhammad Iqbal, Amries Rusli Tanjung, Supriono, “Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Belanja Modal, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pada Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Dan Kota Provinsi Riau Dan Sumatera Barat)”. *JOM Fekom*, Vol. 4, No. 1 (Februari 2017), h. 886-887.

⁷Lincoln Arsyad, “*Ekonomi Pembangunan*”, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), h. 82.

menggunakan asumsi bahwa laju pertumbuhan penduduk sama setiap tahunnya.

Rumus laju pertumbuhan penduduk geometrik adalah sebagai berikut:⁸

$$P_t = P_o (1 + r)^t$$

Keterangan :

P_t = jumlah penduduk pada tahun t

P_o = jumlah penduduk pada tahun dasar

t = jangka waktu

r = laju pertumbuhan penduduk

4. Jumlah Penduduk dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam pandangan Islam sesungguhnya lebih mendorong kita untuk memiliki keturunan yang berkualitas dibandingkan dengan keturunan yang kuantitasnya (jumlah) banyak. Kendati dalam satu riwayat, Nabi mengatakan bahwa ia bangga dengan umat yang banyak (*ana mukasirun bikum al-anbiya'*). Namun hadis ini tetap harus dibaca dalam konteks kualitas. Umat yang jumlahnya banyak namun tidak berkualitas, alih-alih memberi rasa bangga, yang terjadi justru sebaliknya, merendahkan dan melemahkan. Apa yang kita rasakan saat ini adalah bukti, jumlah umat Islam yang banyak di negeri yang tercinta ini, tidak membuat kita bangga sama sekali sebagai umat Islam. Jumlah yang banyak tidak berkontribusi pada pembangunan peradaban yang damai dan sejahtera. Dalam hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 9:

⁸Wali Ayu Rumbia, "Proyeksi Penduduk Berlipat Ganda Di Kota Bau-Bau" *Jurnal Ekonomi Pembangunan FE-Unhalu*, Vol. 2, No. 1 (Desember 2008), h. 2-3.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةَ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا ﴿١٠٠﴾

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.

Kesejahteraan merupakan impian dan harapan bagi setiap manusia yang hidup di muka bumi ini, setiap orang tua pasti mengharapakan kesejahteraan bagi anak-anak dan keluarganya, baik itu berupa kesejahteraan materi maupun kesejahteraan spiritual, orang tua selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, mereka akan bekerja keras, membanting tulang, mengerjakan apa saja demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, mereka akan memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi keluarganya dari berbagai macam gangguan dan bahaya yang menghadangnya.

Bagi pemerintah kesejahteraan seringkali diukur dengan nilai GNP perkapita, yang merupakan rasio perbandingan antara nilai GNP dengan jumlah penduduk, namun demikian jika melihat realita di tengah masyarakat, maka kita akan menyimpulkan bahwa pengukuran kesejahteraan dengan menggunakan GNP perkapita belum tepat, karena di kalangan masyarakat pedesaan masih sangat banyak orang-orang yang hidup di bawah standar kelayakan hidup.

Sunarti (2006) mengemukakan bahwa salah satu aspek spesifik yang sering digunakan sebagai indikator untuk mengukur kesejahteraan rakyat adalah

kependudukan, yang meliputi jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, sebaran dan kepadatan penduduk, migrasi dan fertilitas. Selain itu, Al-Ghazali juga merumuskan seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi untuk menciptakan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya.⁹ Al-Qur'an telah menyinggung indikator kesejahteraan dalam surat Al-Quraaisy ayat 3-4:

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۚ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۚ

Artinya: “Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan”.

B. Tenaga Kerja

1. Pengertian Tenaga Kerja

Menurut pendapat Suparmoko (2002), tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara dalam memproduksi barang atau jasa, tenaga kerja yang dalam usia kerja yaitu antara 15-64 tahun. Menurut pendapat Simanjuntak (2002), tenaga kerja adalah penduduk yang berumur diatas 10 tahun atau lebih. Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.¹⁰ Todaro (2003) menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk dan

⁹Amirus Sodik, “Konsep Kesejahteraan Dalam Islam”. *Jurnal Equilibrium*, Vol 3, No. 2, (Desember 2015), h. 381-390.

¹⁰Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja.

pertumbuhan tenaga kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi.¹¹

Lewis mengemukakan teorinya mengenai ketenagakerjaan yaitu, kelebihan pekerja merupakan kesempatan dan bukan masalah. Kelebihan pekerja satu sektor akan memberikan andil terhadap pertumbuhan *output* dan penyediaan pekerja di sektor lain. Selanjutnya Lewis mengemukakan bahwa ada dua sektor di dalam perekonomian negara sedang berkembang, yaitu sektor modern dan sektor tradisional. Sektor tradisional tidak hanya berupa sektor pertanian di pedesaan, melainkan juga termasuk sektor informal di perkotaan (pedagang kaki lima, pengecer, pedagang angkringan). Sektor informal mampu menyerap kelebihan tenaga kerja yang ada selama berlangsungnya proses industrialisasi, sehingga disebut katub pengaman ketenagakerjaan. Dengan terserapnya kelebihan tenaga kerja disektor industri (sektor modern) oleh sektor informal, maka pada suatu saat tingkat upah di pedesaan akan meningkat.

Peningkatan upah ini akan mengurangi perbedaan tingkat pendapatan antara pedesaan dan perkotaan, sehingga kelebihan penawaran pekerja tidak menimbulkan masalah pada pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya kelebihan pekerja justru merupakan modal untuk mengakumulasi pendapatan, dengan asumsi perpindahan tenaga kerja dari sektor tradisional ke sektor modern berjalan lancar dan perpindahan tersebut

¹¹Evi Adriani, Sri Indah Handayani, "Pengaruh PDRB Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Merangin", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. Vol. 8, No. 2 (Juli Tahun 2008), h. 2.

tidak pernah menjadi terlalu banyak.¹² Esmara (1986), mengatakan bahwa kesempatan kerja dapat diartikan sebagai jumlah penduduk yang bekerja atau orang yang sudah memperoleh pekerjaan semakin banyak orang yang bekerja semakin luas kesempatan kerja.

Sedangkan Sagir (1994), memberi pengertian kesempatan kerja sebagai lapangan usaha atau kesempatan kerja yang tersedia untuk bekerja akibat dari suatu kegiatan ekonomi, dengan demikian kesempatan kerja mencakup lapangan pekerjaan yang sudah diisi, dari kesempatan kerja juga dapat diartikan sebagai partisipasi dalam pembangunan. Sedangkan Sukirno (2000), memberikan pengertian kesempatan kerja sebagai suatu keadaan dimana semua pekerja yang ingin bekerja pada suatu tingkat upah tertentu akan dengan mudah mendapat pekerjaan. Swasono dan Sulityaningsih (1993), memberi pengertian kesempatan kerja adalah termasuk lapangan pekerjaan yang sudah diduduki (*employment*) dan masih lowong (*vacancy*).¹³

2. Klasifikasi Tenaga Kerja

Menurut DR Payaman Siamanjuntak tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Secara praktis

¹²Suprianto, Binar Dwiyanto, Pamungkas, Julia Zikriana, “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan, Dan Kesehatan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2010-2015”, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*. Vol. 14, No. 2, (Agustus 2017), h.190-191.

¹³Andri Devita, Arman Delis, Junaidi, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi”. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*. Vol. 2, No. 2, (Oktober-Desember 2014), h. 64.

pengertian tenaga kerja menurutnya hanya dibedakan oleh batasan umur.¹⁴ Konsep tenaga kerja yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai penyedia data ketenagakerjaan yang dihasilkan dari berbagai survei di Indonesia. Berdasarkan konsep tersebut klasifikasi tenaga kerja adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan penduduk

1. Tenaga kerja

Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja, mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun.

2. Bukan tenaga kerja

Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk di luar usia, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. Contoh kelompok ini adalah para pensiunan, para lansia (lanjut usia) dan anak-anak.

¹⁴Sendjun H Manululang, “*Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*”, (Jakarta: PT Rineka Citra, 1998), h. 3.

b. Berdasarkan batas usia kerja

1. Angkatan kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan.

2. Bukan angkatan kerja

Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya. Contoh kelompok ini adalah:

- a) Anak sekolah dan mahasiswa.
- b) Para ibu rumah tangga dan orang cacat.
- c) Para pengangguran sukarela.

c. Berdasarkan kualitasnya

1. Tenaga kerja terdidik

Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal dan nonformal. Contohnya: pengacara, dokter, guru, dan lain-lain.

2. Tenaga kerja terlatih

Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil ini dibutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut. Contohnya: apoteker, ahli bedah, mekanik, dan lain-lain.

3. Tenaga kerja tidak terdidik dan terlatih

Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contoh: kuli, buruh angkut, pembantu rumah tangga, dan sebagainya.

3. Tenaga Kerja dalam Perspektif Ekonomi Islam

Menurut Imam Syaibani kerja merupakan usaha untuk mendapatkan uang atau harga dengan cara halal. Dalam islam kerja sebagai unsur produksi didasari konsep istikhaf, dimana manusia bertanggung jawab untuk memakmurkan dunia dan juga bertanggungjawab untuk menginvestasikan dan mengembangkan harta yang diamanatkan Allah SWT untuk menutupi kebutuhan manusia.¹⁵ Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, bahkan menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, lebih dari itu Allah SWT akan memberikan balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal/kerja sesuai dengan firman Allah dalam Q.S An-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: “Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.

¹⁵Nurul Huda Et. Al, “*Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*”, (Jakarta: Kencana 2008), h. 227.

Menurut Hasan, tenaga kerja dalam islam adalah tenaga kerja yang memiliki nilai positif yaitu Bekerja keras dengan ikhlas dan mencintai pekerjaannya, Hidup tertib dan penuh disiplin, Menjalin ukhuwah islamiyah dan suka berjamaah, Berlaku jujur, pandai bersyukur, memuliakan mitra, memaksimalkan ikhtiar dan doa, mampu mengembangkan potensi diri, menepati janji, taat beribadah, istiqomah menghindari kemungkaran, bekerja dengan tulus, bersahabat dengan lingkungan, suka belajar dari pengalaman, menganut pola hidup hemat, berlaku amanah, dan percaya diri.¹⁶

Etos kerja adalah nilai-nilai yang membentuk kepribadian seseorang dalam bekerja. Etos kerja pada hakikatnya dibentuk dan dipengaruhi oleh sistem nilai-nilai yang dianut oleh seseorang dalam bekerja, yang kemudian membentuk semangat yang membedakannya, antara yang satu dan yang lainnya. Dengan demikian etos kerja adalah kualitas esensial (semangat) dari kerja seorang individu atau kelompok, dimana kualitas tersebut merupakan pancaran dari sistem nilai serta ide yang diyakini.

Ahmad Janan Asifuddin (2005) mengemukakan etos kerja seorang muslim diartikan sebagai cara pandang yang diyakini seorang muslim bahwa bekerja itu bukan saja untuk memuliakan dirinya, menampilkan kemanusiannya, tetapi juga sebagai suatu manifestasi dari amal saleh dan karenanya memiliki nilai ibadah yang sangat luhur. Dengan demikian, etos kerja adalah bagian dari proses eksistensi diri manusia dalam lapangan kehidupannya yang amat luas dan kompleks. Salah satu etos

¹⁶Hasan Aedy, “*Etika Dan Bisnis Islam Teori Dan Aplikasi*”, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 46.

kerja dalam islam yang harus dimiliki tenaga kerja yaitu tenaga kerja harus bekerja secara konsisten. Dapat dikatakan bahwa maksud bekerja secara konsisten adalah melaksanakan sebuah pekerjaan secara terus menerus dengan memaksimalkan kemampuan yang ada dan menekuninya.¹⁷ Dalam hal ini sesuai dengan firman Allah surat Al-Hud ayat 112:

فَأَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٢﴾

Artinya: “Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan (juga) orang yang telah taubat beserta kamu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

Dengan demikian pentingnya melaksanakan pekerjaan secara konsisten, karena bahwa dengan konsistensi yang dilakukan akan membuat sebuah pekerjaan kecil menjadi besar. Pada saat yang sama sebenarnya pekerja yang melakukan dan melaksanakan pekerjaan secara konsisten mengindikasikan kualitas yang baik dari keimanannya. Hal tersebut secara tidak langsung dapat mengatasi masalah rendahnya kualitas SDM dan rendahnya upah pekerja.

C. Dana Alokasi Bantuan Pembangunan

Dana alokasi bantuan pembangunan daerah merupakan salah satu sumber keuangan untuk melakukan pembangunan daerah. Pada dasarnya dalam melaksanakan pembangunan diperlukan sumber dana. Untuk mencapai keberhasilan suatu program pembangunan sangat tergantung pada pemanfaatan sumber daya yang

¹⁷M. Thoib Nasution, “Etos Kerja Dalam Perspektif Islam”. *Jurnal Ihtiyadh*, Vol. 1, No. 1, (September 2017), h. 79-97.

tersedia. Namun potensi dan pemanfaatan sumber daya tersebut bervariasi antar daerah. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Marisa dan Hutabarat (1988) serta Nurmanah (1989) dalam Hartono (2008) mengidentifikasikan bahwa ketimpangan dan variasi distribusi pendapatan mempunyai hubungan yang positif dengan distribusi penguasaan faktor-faktor produksi. Dengan demikian tidak mengherankan bila keberhasilan pembangunan antar daerah berbeda-beda. Sehingga perlu adanya campur tangan pemerintah pusat untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah, misal dengan memberikan bantuan kepada daerah untuk mempercepat pembangunan daerah.¹⁸

Dana alokasi bantuan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan pengeluaran pembangunan pemerintah pusat ke daerah kabupaten/kota. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, “Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi”. Dana Perimbangan disebut juga transfer atau grants. Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya keuangan dan ekonomi daerah. Selain itu tujuan transfer adalah mengurangi keuangan horizontal antar daerah, mengurangi kesenjangan vertical Pusat-Daerah, mengatasi persoalan efek pelayanan publik antar daerah, dan untuk menciptakan stabilitas aktivitas perekonomian di daerah. Dana perimbangan terdiri

¹⁸Hartono Budiantoro, *Op.Cit.* h. 70.

dari, Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

1. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil ini bersumber dari pajak dan kekayaan daerah. Dimana menurut Pasal 11 ayat 1 UU No. 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil yang berasal dari pajak terdiri dari : “1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), 3) Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Orang Wajib Pajak Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21”. Sedangkan pada pasal 11 ayat 2 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil yang berasal dari sumber daya alam terdiri dari “1) kehutanan, 2) pertambangan umum, 3) perikanan, 4) pertambangan minyak bumi, 5) pertambangan gas bumi, 6) pertambangan panas bumi ”.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.¹⁹ Dana Alokasi Umum merupakan *block grants* yang diberikan kepada semua kabupaten/kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya. Penggunaan

¹⁹Sugeng Haryanto, “Analisis Pengaruh PAD, DAU Dan DAK Terhadap Belanja Modal Dan Belanja Barang Dan Jasa Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2006-2012”. *Jurnal Modernisasi*, Vol. 9, No. 2, (Juni 2013), h. 145.

Dana Alokasi Umum ditetapkan oleh daerah. Penggunaan Dana Alokasi Umum dan penerimaan umum lainnya dalam APBD harus tetap pada kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, seperti pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Berdasarkan UU NO. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Pasal 39 menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam APBN.²⁰ Dana Alokasi Khusus (DAK) ditujukan untuk daerah khusus yang terpilih untuk tujuan khusus, karena itu alokasi yang didistribusikan oleh pemerintah pusat sepenuhnya merupakan wewenang pusat untuk tujuan nasional khusus. Ada tiga kriteria dari kebutuhan khusus seperti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

- a. Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus dana alokasi umum.
- b. Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional.

²⁰Kadek Rosita Dewi, Putu Kepramareni, Ni Luh Gde Novitasari, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota Se-Bali (Periode Tahun 2012-2015)". *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. 7 No.1 (September 2017), h. 182.

- c. Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil.

Menurut Wijaya (2007) menyatakan bahwa biaya administrasi, biaya penyiapan proyek fisik, biaya penelitian, biaya perjalanan pegawai daerah, dan lain-lain. Biaya umum yang sejenis tidak dapat dibiayai oleh dana alokasi umum. Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan yang sudah digariskan. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris dana perimbangan yang terdiri dari DAU dan DAK yang selanjutnya disebut dana alokasi bantuan pembangunan terhadap tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi, penelitian ini tidak memasukan Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai bagian dari dana alokasi bantuan, karena menurut pengertian sebelumnya DBH bersumber dari pajak dan kekayaan daerah dan kembali lagi ke daerah sesuai persentase yang ditetapkan, berbeda dengan DAU dan DAK yang langsung bersumber dari APBN.

4. Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dalam Perspektif Islam

Dana alokasi umum dan dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Tarqiqi mengemukakan mengenai beberapa karakteristik dalam pertumbuhan ekonomi islam yaitu, bahwa pertumbuhan lebih dari sekedar materi dan memiliki tujuan yang lebih universal dibandingkan dengan orientalis terbatas yang ingin dicapai oleh sistem-sistem kontemporer yaitu untuk menciptakan keadilan

sosial. Islam berada dalam posisi lebih utama di mana yang ingin diciptakan yaitu masyarakat yang semua dari semua aspek.²¹ Pertumbuhan ekonomi islam tidak hanya diorientasikan untuk menciptakan pertambahan produksi, namun ditujukan berlandaskan keadilan distribusi sesuai dengan firman Allah QS. Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Maidah ayat 8)

Keadilan dilakukan dengan memberlakukan kebaikan bagi semua manusia dalam kondisi apapun. Tujuan pertumbuhan ekonomi islam yaitu adanya kesempatan semua anggota masyarakat untuk mendapatkan kecukupan, bukan kekurangan. Pemerintah harus menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat dari padanya secara adil dan baik. Keadilan dalam hukum islam berarti pula keseimbangan anantara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Dibiidang usaha untuk meningkatkan ekonomi, keadilan merupakan nafas dalam menciptakan pemerataan dan kesejahteraan karena itu harta jangan hanya beredar pada orang kaya, tetapi juga pada mereka yang membutuhkan.

²¹Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam*,(Jakarta:Prenadamedia Group,2015),h.126-127

D. Indeks Williamson

Disparitas (ketimpangan) pembangunan ekonomi antar wilayah merupakan fenomena umum yang terjadi dalam proses pembangunan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada awalnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong proses pembangunan juga ukuran ketimpangan pendapatan yang lebih penting lagi untuk menganalisis seberapa besarnya kesenjangan antar wilayah/daerah adalah dengan melalui perhitungan indeks Williamson. Dasar perhitungannya adalah dengan menggunakan PDRB per kapita dalam kaitannya dengan jumlah penduduk per daerah.

Indeks Williamson lazim digunakan dalam pengukuran ketimpangan pembangunan antar wilayah. Indeks Williamson menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita sebagai ketimpangan regional (*regional inequality*) sebagai data dasar. Alasannya jelas karena yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antar wilayah dan bukan tingkat distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat. Indeks Williamson merupakan salah satu alat ukur untuk mengukur tingkat ketimpangan daerah yang semula dipergunakan oleh Jeffrey G. Williamson.²²

Formulasi Indeks Williamson yang digunakan yaitu:

²²Denny Iswanto, "Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Propinsi Jawa Timur". *Jurnal Yayasan Al-Kahfi Tangerang Selatan*, Vol. 4, No. 1 (April 2015), h. 50.

$$I_W = \frac{\sqrt{\sum (y_i - \bar{y})^2 (f_i : n)}}{\bar{y}}, 0 < I_W < 1$$

Keterangan

I_W = Indeks Williamson

f_i = Jumlah penduduk kabupaten/kota ke- i (jiwa)

n = Jumlah penduduk Provinsi Lampung

Y_i = PDRB per kapita kabupaten/kota ke- i (Rupiah)

\bar{y} = PDRB per kapita rata-rata di Provinsi Lampung

Hasil pengukuran dari nilai Indeks Williamson ditunjukkan oleh angka 0 sampai angka 1 atau $0 < IW < 1$. Jika nilai IW semakin mendekati angka 0 maka semakin kecil ketimpangan pembangunan ekonomi dan jika nilai IW semakin mendekati angka 1 maka semakin melebar ketimpangan pembangunan ekonomi.

E. Ketimpangan Ekonomi

1. Definisi Ketimpangan/ Kesenjangan Ekonomi

Menurut Mudrajad Kuncoro, kesenjangan mengacu pada standar hidup relatif dari seluruh masyarakat. Sebab kesenjangan antar wilayah yaitu adanya perbedaan faktor anugrah awal (*endowment factor*). Perbedaan inilah yang menyebabkan tingkat pembangunan di berbagai wilayah dan daerah berbeda beda, sehingga menimbulkan gap atau jurang kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut. Menurut Hipotesa Neo Klasik, pada permulaan proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai

ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu, bila proses pembangunan terus berlanjut, maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan menurun.²³

Teori ketimpangan dan disparitas antar wilayah dikemukakan oleh Jeffrey G. Williamson yang menganalisa distribusi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi pada tingkat regional pada suatu negara, ternyata dijumpai dalam suatu negara terdapat suatu wilayah berpendapatan tinggi yang selalau diikuti sekelompok wilayah berpendapatan menengah dan rendah. Bila perbedaan antara yang berpendapatan perkapita tinggi dan yang rendah sangat besar maka terjadi ketimpangan pendapatan yang tinggi. Dalam tahapan awal pembangunan, pertumbuhan ekonomi nampak lebih merata diantara wilayah-wilayah, tetapi dalam tahap lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi antar wilayah menampakkan perbedaan yang semakin bertambah besar, yang berarti disparitas antar wilayah bertambah besar.²⁴

2. Kesenjangan Ekonomi Antar Daerah

Hasil studi Kuncoro menyimpulkan adanya perbedaan pertumbuhan ekonomi antar daerah dapat disebabkan oleh berbagai factor diantaranya: kecenderungan peranan modal (investor) memilih daerah perkotaan atau daerah yang memiliki fasilitas yang lengkap seperti: prasarana perhubungan, jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, perbankan, asuransi, juga tenaga kerja yang terampil,

²³Lyra Bumannara Syarif, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Ketimpangan Ekonomi Antar Wilayah", tersedia di: <https://www.scribd.com/doc/147273102/Summary-Pendapat-Ahli-Ttg-Penyebab-Ketimpangan-Wilayah>, (on-Line) tanggal 10 April 2018.

²⁴Prof. Dr. Rahardjo Adisasmita, "*Teori-Teori Pembangunan Ekonomi*", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h..76

disamping itu adanya ketimpangan redistribusi pembagian pendapatan dari pemerintah pusat kepada daerah.

Adanya perbedaan tingkat pembangunan di berbagai daerah atau wilayah dalam suatu negara akan menyebabkan tingkat kesenjangan antar daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang yang mana bila hal ini terus dibiarkan maka akan menyebabkan tingkat kesenjangan yang akan semakin meluas. Tentunya juga akan menyebabkan pula tingkat kesejahteraan penduduknya secara umum akan timpang hal ini disebabkan perbedaan tingkat PDRB per kapita yang dimiliki masing-masing wilayah tidak sama.

Menurut teori Neo Klasik ketimpangan ekonomi antar wilayah tersebut dapat mencapai keseimbangan kembali dengan sendirinya, karena daerah-daerah tertinggal akan dengan sendirinya memusat (konvergen) dengan daerah yang lebih maju. Para ekonom Neo Klasik seperti Solow, Suan dan Meade mengajukan model dengan menggunakan beberapa asumsi sebagai berikut (1) Full employment; (2) Persaingan sempurna; (3) Komoditi homogen; (4) Ongkos transportasi nol; (5) Penambahan faktor produksi akan proporsional dengan penambahan produksi yang diperoleh antar wilayah (Constant return to scale); (6) Supply tenaga kerja tetap; (7) Tingkat teknologi tetap. Berdasarkan asumsi tersebut, maka tingkat upah merupakan fungsi langsung dari rasio kapital dan tenaga kerja, sehingga akan terjadi pergerakan tenaga

kerja dari daerah yang tingkat upahnya rendah ke daerah yang tingkat upahnya tinggi, sementara modal bergerak sebaliknya.²⁵

3. Ketimpangan/Kesenjangan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Islam sebagai sistem hidup (*way of life*) dan merupakan agama yang universal sebab memuat segala aspek kehidupan baik yang terkait dengan aspek ekonomi, sosial, politik dan budaya. Seiring dengan maju pesatnya kajian tentang ekonomi islam dengan menggunakan pendekatan filsafat dan sebagainya mendorong kepada terbentuknya suatu ilmu ekonomi berbasis keislaman yang terfokus untuk mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang di ilhami oleh nilai-nilai Islam. Mustafa E Nasution menjelaskan bahwa berbagai krisis yang melanda perekonomian dunia yang menyangkut sistem ekonomi kapitalis dewasa ini telah memperburuk tingkat kemiskinan serta pola pembagian pendapatan di dalam perekonomian negara-negara yang ada, lebih-lebih lagi keadaan perekonomian di negara-negara Islam.

Sistem ekonomi islam sangat melindungi kepentingan setiap warganya baik yang kaya maupun yang miskin dengan memberikan tanggung jawab moral terhadap si kaya untuk memperhatikan si miskin. Islam mengakui sistem hak milik pribadi secara terbatas, setiap usaha apa saja yang mengarah ke penumpukan kekayaan yang tidak layak. Al-Qur'an menyatakan agar si kaya mengeluarkan sebagian dari rezekinya untuk kesejahteraan masyarakat, baik dengan jalan zakat, sadaqaah, hibah, wasiat dan sebagainya, sebab kekayaan harus tersebar dengan baik. Ada tiga

²⁵Budiantoro Hartono, *Op. Cit.* h. 30.

instrumen dalam mengurangi perbedaan kekayaan masyarakat, yaitu:

1. Parameter Positif atau wajib (*Positive Measure*) yang terdiri atas zakat dan faraid (waris). Parameter ini untuk menjamin aliran minimal kekayaan dari kelompok mampu kepada kelompok yang kurang mampu.
2. Parameter Sukarela (*Voluntary Measure*) yang terdiri dari infaq, sedekah dan wakaf. Instrumen ini mampu mendorong lebih terdistribusinya aset dan kekayaan di masyarakat sehingga *Voluntary Measure* bisa menjadi alternatif pendanaan pembangunan daerah.
3. Parameter Larangan (*Prohibitive Measure*) yang terdiri dari larangan riba dan kezaliman ekonomi. Instrumen yang masuk dalam kategori ini adalah praktik-praktik kezaliman ekonomi, seperti penipuan, riba dan penimbunan. Instrumen ini dapat menyebabkan distorsi dan ketidak seimbangan pasar, sehingga membahayakan stabilitas perekonomian. Akibatnya, peta kekayaan akan menunjukkan konsentrasi pada golongan tertentu dan menciptakan jurang kesenjangan yang semakin dalam dan melebar.²⁶

Islam memang tidak mengharuskan persamaan dalam kepemilikan kekayaan, namun Islam tidak membiarkan buruknya distribusi kekayaan. Islam memandang individu sebagai manusia yang harus dipenuhi kebutuhan-kebutuhan primernya secara menyeluruh. Sebagai buktinya, banyak sekali ayat Al-Quran dan al-Hadits yang memerintahkan manusia menginfakkan harta dan memberi makan orang-orang

²⁶Dr. Irfan Syauqi, "*Ekonomi Pembangunan Syariah*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 46.

fakir, miskin, dan kekurangan. Islam mencegah berputarnya harta kekayaan hanya di kalangan orang-orang kaya, sementara kelompok lainnya tidak memperoleh bagian.

Allah SWT berfirman:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kotakota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya”. (QS. Al-Hasyr: 7)

Munthe (2014) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa dalam pandangan sistem ekonomi Islam, buruknya distribusi kekayaan di tengah masyarakat itulah yang membuat timbulnya kemiskinan dan ketimpangan ekonomi.²⁷ Isu-isu ketimpangan pendistribusian pendapatan dan kekayaan di Indonesia, kritik terhadap distribusi dalam ekonomi kapitalis dan diakhiri dengan telaah terhadap distribusi ekonomi Islam dalam mewujudkan keadilan distributif serta mekanisme distribusi dalam Islam sebagai solusi menuju keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Keadilan distributif adalah prinsip utama dalam ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam

²⁷Marabon Munthe, “Konsep Distribusi Dalam Islam”. *Jurnal Ekonomi Syariah STEI Annisa Pekanbaru*, (2014) Vol. 2, No. 1, h. 71-79.

menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian harus didasarkan pada dua sendi, yaitu kebebasan dan keadilan.

Kebebasan di sini adalah kebebasan yang dibingkai oleh nilai-nilai tauhid dan keadilan. tetapi sebagai keseimbangan antara individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dan masyarakat serta antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Sedangkan keadilan dalam pendistribusian ini tercermin dari larangan dalam Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 7 agar harta kekayaan tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, tetapi diharapkan dapat memberi kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Oleh karena itu, dalam sistem ekonomi Islam, penumpukan kekayaan oleh sekelompok orang harus dihindarkan dan langkah-langkah dilakukan secara otomatis untuk memindahkan aliran kekayaan kepada masyarakat yang lemah agar kesejahteraan masyarakatpun terpenuhi.²⁸

F. Penelitian Terdahulu

1. Budiantoro Hartono, dalam penelitiannya tentang Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Di Provinsi Jawa Tengah. Menggunakan beberapa variabel yaitu Ketimpangan Pembangunan Ekonomi (Y), Investasi (X1), Angkatan Kerja (X2), dan Dana Alokasi Bantuan (X3). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, alat analisis yang digunakan uji statistik t, uji statistik f, dan regresi berganda. Dengan hasil penelitian menyatakan

²⁸Anita Rahmawati, "Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif". *Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus*, (2013), h. 7-8.

bahwa variabel bebas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Nilai f hitung sebesar 1,899 dengan angka signifikansi 0,000 ($0.000 < 0,05$).²⁹

2. Kamal Idris, Syaparuddin, dan Siti Hodijah, dalam penelitiannya mengenai Perumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja, Kemiskinan, dan Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jambi. Menggunakan beberapa variabel yaitu Ketimpanagn Pendapatan (Y), Pertumbuhan Ekonomi (XI), Kesempatan Kerja (X2), Kemiskinan (X3). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, alat analisis yang digunakan analisis regresi sederhana dengan panel data. Dengan hasil penelitian menyatakan bahwa pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesempatan kerja di Kabupaten Merangin, Sarolangun, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat dan Bungo Provinsi Jambi positif dan tidak signifikan. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Kabupaten Merangin, Sarolangun, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat dan Bungo Provinsi Jambi negatif dan tidak signifikan. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten Merangin, Sarolangun, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat dan Bungo Provinsi Jambi positif dan tidak signifikan.³⁰
3. Rizka Mardela Okta Putri, dalam penelitiannya mengenai Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di

²⁹Budiantoro Hartono, *Op. Cit.* h. 67.

³⁰Kamal Idris, Syaparuddin, dan Siti Hodijah, *Op. Cit.* h. 52-58.

Provinsi Lampung. Menggunakan beberapa variabel yaitu Ketimpangan Pembangunan (Y), Pertumbuhan Ekonomi (X1), Tenaga Kerja (X2), Dana Alokasi Bantuan (X3). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, alat analisis yang digunakan uji asumsi klasik, hipotesis, dan OLS (Ordinary Least Square). Dengan hasil penelitian menyatakan bahwa variabel bebas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Lampung. Nilai f hitung sebesar 2,66 pada tingkat signifikansi (α) 10%.³¹

Dari penelitian terdahulu diatas mempunyai persamaan dalam metode penelitian yaitu metode kuantitatif, sama-sama membahas tentang Ketimpangan Pembangunan Ekonomi dengan objek penelitian berbeda. Dan terdapat perbedaan yaitu penelitian terdahulu menggunakan ekonomi konvensional sedangkan penulis dalam perspektif ekonomi islam dan menggunakan variabel yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besar pengaruh Jumlah Penduduk, Tenaga Kerja, dan Dana Alokasi Bantuan Pembangunan terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Lampung Tahun 2012-2016 ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam.

G. Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya pembangunan ekonomi diartikan sebagai serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonomi sehingga infrastruktur

³¹Rizka mardela okta putri, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Lampung". *Skripsi*. Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Lampung, 2016, h. 36-62.

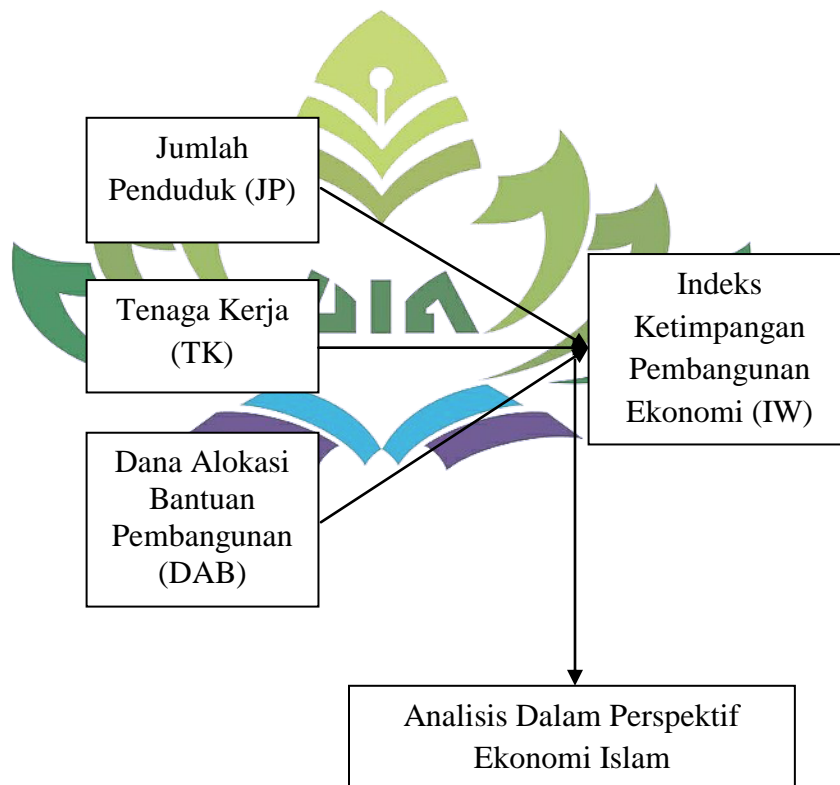
lebih banyak tersedia, perusahaan semakin banyak dan semakin berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi dan teknologi semakin meningkat. Sebagai implikasi dari perkembangan ini diharapkan kesempatan kerja bertambah, tingkat pendapatan meningkat, dan kemakmuran masyarakat semakin tinggi. Jumlah penduduk atau peningkatan jumlah penduduk yang dialami suatu daerah yang terkendali dengan baik dapat mempengaruhi secara negatif terhadap ketimpangan pertumbuhan ekonomi. Artinya terkendalinya jumlah penduduk suatu daerah akan menurunkan ketimpangan pembangunan ekonomi.

Jumlah tenaga kerja yang ada dapat mempengaruhi tingkat ketimpangan. Dengan adanya tenaga kerja yang meningkat berarti ada kenaikan kegiatan ekonomi dan tingkat kemakmuran, sehingga ketimpangan mengalami penurunan. Jumlah tenaga kerja mempunyai pengaruh secara negatif terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi. Berarti semakin meningkat tenaga kerja akan menurunkan ketimpangan pembangunan ekonomi. Keberhasilan suatu program pembangunan sangat tergantung pada manfaat sumber daya yang tersedia. Sehingga perlu adanya campur tangan pemerintah untuk mengurangi ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah.

Penelitian ini salah satunya bertujuan untuk mengetahui dana perimbangan yang khusus terdiri dari DAU dan DAK yang selanjutnya disebut dana alokasi bantuan pembangunan terhadap tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi. Jika dana alokasi bantuan pembangunan daerah meningkat maka ketimpangan pembangunan akan semakin kecil.

Dalam sudut pandang Ekonomi Islam ketimpangan pembangunan yang terjadi pada suatu daerah dapat terjadi karena distribusi yang tidak seimbang, pemerataan pembangunan dan tingkat pertumbuhan tinggi tidak diimbangi dengan pengalokasian tenaga kerja hal tersebut dapat berimbas pada kemiskinan suatu daerah dan terjadinya kesenjangan pada daerah tersebut.

Berdasarkan uraian dari kerangka pemikiran maka hubungan antara variabel independen (bebas) dengan variabel (terikat) dapat dilihat pada gambar berikut:



H. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu dugaan jawaban yang paling memungkinkan walaupun masih harus dibuktikan dengan penelitian. Dugaan jawaban sementara ini pada prinsipnya bermanfaat membantu mahasiswa agar proses penelitiannya lebih terarah. Hipotesis dirumuskan dalam kalimat pertanyaan.³² Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

- a) Ho1 : Jumlah Penduduk tidak berpengaruh terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Lampung.
H1 : Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Lampung.
- b) Ho2 : Tenaga Kerja tidak berpengaruh terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Lampung.
H2 : Tenaga Kerja berpengaruh terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Lampung.
- c) Ho3 : Dana Alokasi Bantuan Pembangunan tidak berpengaruh terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Lampung.
H3 : Dana Alokasi Bantuan Pembangunan berpengaruh terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Di Provinsi Lampung.

³² Hariwijaya dan Triton, “*Pedoman Penulisan Ilmiah Proposal dan Skripsi* “, (Yogyakarta: Tugu Publisher, 2008), h. 50.

d) Ho4 : Jumlah Penduduk, Tenaga Kerja, Dana Alokasi Bantuan Pembangunan tidak berpengaruh terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Di Provinsi Lampung.

H4 : Jumlah Penduduk, Tenaga Kerja, Dana Alokasi Bantuan Pembangunan berpengaruh terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Di Provinsi Lampung.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian secara kuantitatif, metode kuantitatif adalah metode yang penyajian datanya di dominasi dalam bentuk angka dan analisis data yang digunakan bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis.¹

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Libraray Research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur kepustakaan, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.²

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena dalam penelitian ini menggambarkan gambaran tentang pengaruh Jumlah Penduduk, Tenaga Kerja, dan Dana Alokasi Bantuan Pembangunan terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Lampung yang menuturkan pemecahan masalah sekarang berdasarkan data-data, juga menyajikan data, menganalisis serta menginterpretasikanya.

¹Joko Subagyo, “*Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 97.

²Iqbal Hasan, “*Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h.5.

Deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.³ Dalam kaitanya dengan penelitian ini menggambarkan apa adanya, tentang hal-hal yang berkenaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi investasi di Provinsi Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam.

B. Sumber Data

Dalam usaha untuk mencari kebenarannya, peneliti ini menggunakan data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data-data yang penyajiannya dalam bentuk angka secara sepiantas lebih mudah untuk diketahui maupun untuk dibandingkan satu dengan yang lainnya.⁴ Data-data kuantitatif dalam penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan ekonomi di provinsi Lampung dalam perspektif ekonomi islam.

Adapun data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data sekunder dengan mengutip literatur dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian data-data dari instansi pemerintah yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.

³Nurul Zuriah, "*Metode Penelitian Sosial, dan Pendidikan Teori-Aplikasi*", (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h.47.

⁴Joko Subagyo, *Op.Cit*, h.97.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data dilokasi penelitian, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, dan buku-buku, surat kabar, majalah dapat juga berbentuk file yang tersimpan di server serta data yang tersimpan di website.⁵ Data ini bersifat tidak terbatas ruang dan waktu. Penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan data-data resmi yang diterbitkan oleh badan pusat statistik.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari dan mengambil data dari literatur terkait dan sumber-sumber lain seperti buku, catatan maupun laporan hasil penelitian terdahulu yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai penelitian ini.⁶

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁷ Populasi yang diambil dalam

⁵Arikunto, Suharsimi, “*Prosedur Pendekatan Suatu Pendekatan Praktik*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.231.

⁶Wiratna, Sujarweni, “*Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*”, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), h.157.

⁷Sugiyono. *Op.Cit.* h.174.

penelitian ini adalah Jumlah Penduduk, Tenaga Kerja, dan Dana Alokasi Bantuan Pembangunan terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Lampung.

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian.⁸ Dalam penelitian ini penulis menggunakan sampel lima tahun yaitu dari tahun 2012-2016. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah *Purposive Sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu.⁹

Penelitian ini menggunakan populasi Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung. Jumlah pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung adalah sebanyak 15 pemerintah daerah yang terdiri dari 2 pemerintah kota, dan 13 pemerintah kabupaten. Populasi penelitian ini adalah 10 Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Lampung. Adapun alasan pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah:

- a. Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang masa pemerintahannya lebih dari 10 tahun.
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang telah menyusun laporan keuangan.
- c. Pemerintah Kabupaten atau Kota di Provinsi Lampung yang mempunyai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah dan telah di publikasi melalui *website* resmi BPS.

⁸Wiratna, Sujarweni, *Op.Cit*, h. 81.

⁹*Ibid*, h. 88.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka ukuran sampel pada penelitian ini sebanyak 10 Kota/Kabupaten yaitu:

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1) Kabupaten Lampung Barat | 6) Kabupaten Tanggamus |
| 2) Kabupaten Lampung Selatan | 7) Kabupaten Tulang Bawang |
| 3) Kabupaten Lampung Tengah | 8) Kabupaten Way Kanan |
| 4) Kabupaten Lampung Timur | 9) Kota Bandar Lampung |
| 5) Kabupaten Lampung Utara | 10) Kota Metro |

E. Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua variabel. Variabel yang pertama merupakan variabel independen yaitu Jumlah Penduduk, Tenaga Kerja, dan Dana Alokasi Bantuan Pembangunan. Variabel yang kedua adalah variabel dependen, yaitu Indeks Ketimpangan Pembangunan Ekonomi.

1. Variabel Terikat (*Variabel Dependen*)

Variabel terikat atau sering disebut dengan variabel output, kriteria, konsekuen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.¹⁰

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Indeks Ketimpangan Pembangunan Ekonomi. Indeks Ketimpangan Pembangunan Ekonomi merupakan ukuran dari disparitas (ketimpangan) pembangunan ekonomi antar wilayah.

¹⁰Sugiyono, *Op.Cit*, h.61.

Ketimpangan Pembangunan Ekonomi diukur dengan menggunakan rumus Indeks Williamson.¹¹

$$I_W = \frac{\sqrt{\sum (y_i - \bar{y})^2 (f_i : n)}}{\bar{y}}, 0 < I_W < 1$$

Keterangan:

I_W = Indeks Williamson

f_i = Jumlah penduduk kabupaten/kota ke-i jiwa

n = Jumlah penduduk Provinsi Lampung

y_i = PDRB per kapita kabupaten-kota ke-i (Rupiah)

\bar{y} = PDRB per kapita rata-rata di Provinsi Lampung

Dimana menggunakan PDRB per kapita atas dasar harga konstan untuk setiap Kabupaten di Provinsi Lampung dari Tahun 2012 sampai Tahun 2016. Sedangkan Indeks Ketimpangan Pembangunan Ekonomi ditunjukkan oleh angka 0 sampai angka 1 atau $0 < I_W < 1$. Jika Indeks Williamson semakin mendekati angka 0 maka tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi semakin kecil dan jika Indeks Williamson semakin mendekati angka 1 maka semakin tinggi ketimpangan pembangunan ekonomi.

¹¹Denny Iswanto, “Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Propinsi Jawa Timur”, Vol. 4, No. 1 (April 2015), h. 50.

2. Variabel Bebas (*Variabel Independen*)

Variabel bebas adalah suatu variabel yang variasinya mempengaruhi variabel lain. Dapat pula dikatakan variabel bebas adalah variabel yang pengaruhnya terhadap variabel lain ingin diketahui.¹² Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas antara lain:

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk menggunakan data jumlah penduduk. Diukur dalam satuan persen di Provinsi Lampung.

b. Tenaga Kerja

Tenaga kerja menggunakan data tenaga kerja yang bekerja yang berumur 15 sampai 64 tahun yang berpartisipasi dalam aktivitas produksi barang dan jasa.

c. Dana Alokasi Bantuan Pembangunan

Dana alokasi bantuan pembangunan diukur dari jumlah dana bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang telah dihitung berdasarkan kuota. Dalam penelitian ini menggunakan jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dinyatakan dalam jutaan rupiah.

¹²*Ibid.* h.62.

F. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah variabel penelitian dimaksudkan untuk memahami arti setiap variabel penelitian sebelum dilakukan analisis, instrument, serta sumber pengukuran berasal dari mana.¹³ Adapun definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Devinisi Variabel	Indikator	Satuan Pengukuran
Jumlah Penduduk (X1)	Jumlah Penduduk merupakan jumlah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dan jumlah penduduk menyangkut kepentingan pembangunan.	a. Kesejahteraan b. Menekan laju pertumbuhan	Jiwa
Tenaga Kerja (X2)	Tenaga Kerja merupakan penduduk dalam usia kerja atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara dalam memproduksi barang atau jasa, tenaga kerja yang dalam usia kerja yaitu antara 15-64 tahun.	a. Etos kerja b. Tingkat upah	Jiwa
Dana Alokasi Bantuan (X3)	Dana Alokasi Bantuan Pembangunan merupakan salah satu sumber keuangan untuk melakukan pembangunan daerah atau yang disebut dana perimbangan. Dana perimbangan terdiri dari, Bagi Hasil	a. Keseimbangan pembangunan b. Distribusi secara merata	Rupiah

¹³Wiratna Sujarweni, *Op.Cit*, h.77.

	Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).		
Ketimpangan Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam (Y)	Ketimpangan Pembangunan Ekonomi merupakan adanya perbedaan pertumbuhan ekonomi antar daerah yang disebabkan oleh berbagai faktor. Adanya perbedaan tingkat pembangunan di berbagai daerah akan menyebabkan tingkat kesenjangan antar daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang.	a. Keadilan b. Pengentasan kemiskinan	Nilai

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka selanjutnya penulis menganalisa data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisa ini penulis menggunakan metode berfikir deduktif yakni berangkat dari fakta-fakta yang umum, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa yang umum dan konkrit ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat khusus.¹⁴

Metode analisis yang digunakan adalah menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan penelitian studi kasus yang dipergunakan untuk mengumpulkan, mengelola, dan kemudian menyajikan data observasi agar pihak lain dapat dengan mudah mendapat gambaran mengenai objek dari penelitian tersebut. Deskriptif kuantitatif dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu menganalisis pengaruh antar variabel.

¹⁴Sutrisno Hadi, “*Metode Reasearch*”, (Yogyakarta: ANDI, 2002), h. 42.

Alat uji analisis data menggunakan analisis regresi berganda, yaitu tentang analisis bentuk dan tingkat hubungan antara satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen.¹⁵ Untuk keabsahan data maka digunakan uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), maka peneliti menggunakan analisis regresi untuk membandingkan dua variabel yang berbeda. Pada analisis regresi untuk memperoleh model regresi yang bisa dipertanggung jawabkan, maka asumsi-asumsi berikut harus dipenuhi. Ada empat pengujian dalam uji asumsi klasik, yaitu:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian dan sebaliknya digunakan sebelum data diolah berdasarkan model-model penelitian. Metode yang layak dan baik digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Kolmogorov-smirnov* untuk mengetahui normal atau tidaknya data yang digunakan. Uji *Kolmogorov-smirnov* adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku. Dengan pengambilan keputusan:

- a) Jika $\text{Sig} > 0,05$ maka data berdistribusi normal

¹⁵Lukas Setia Atmaja, “Statistik Untuk Bisnis dan Ekonomi”, (Yogyakarta: ANDI, 2011), h.177.

b) Jika $\text{Sig} < 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal¹⁶

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dimaksudkan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Apabila terjadi korelasi antara variabel bebas maka terdapat problem multikolinearitas (multiko) pada model regresi tersebut. Deteksi adanya multikolinearitas:

1. Besaran VIF (*Variance Iflation Factor*) dan Tolerance Model regresi yang bebas multikolinearitas adalah :
 - a) Mempengaruhi nilai VIF disekitr angka 1
 - b) Mempunyai angka tolerance mendekati 1
2. Besaran Korelasi antara variabel independen

Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolineritas adalah keofisien korelasi antar variabel independen haruslah lemah dibawah 0,05. Jika korelasi kuat maka terjadi problem multikolinearitas.¹⁷

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada tidaknya korelasi antara varbel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autikorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu

¹⁶V. Wiratna Sujarweni, “*SPSS Untuk Penelitian*”, (Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2015), h. 52-56.

¹⁷*Ibid*, h. 207.

sama lainnya. Untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi dalam suatu penelitian dengan menggunakan uji Durbin-Watson.

Uji Durbin-Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*First Order Autokorelation*) dan mensyaratkan adanya intercept (Konstanta) dalam model regresi dan tidak adanya variabel lagi di antara variabel independen. Hipotesis yang diuji adalah:

H_0 : tidak ada autokorelasi ($\rho=0$)

H_a : ada autokorelasi ($\rho \neq 0$)

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi:

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d_l$
Tidak ada autokorelasi positif	No desicien	$d_l \leq d \leq d_u$
Tidak ada autokorelasi negative	Tolak	$4 - d_l < d < 4$
Tidak ada korelasi negative	No desicien	$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$
Tidak ada autokorelasi positif atau negative	Tidak ditolak	$d_u \leq d < 4 - d_u$

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ditujukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dan *residual* suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Jika *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamata lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara untuk melihat ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dengan pola gambar *Scatterplot*. Dasar analisis dari uji heteroskedastisitas melalui grafik plor adalah sebagai berikut:

- 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

2. Alat Uji Hipotesis

a. Uji T

Uji T digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, yaitu pengaruh masing-masing variabel independen yang terdiri atas pengaruh jumlah penduduk, tenaga kerja, dan dana alokasi bantuan pembangunan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi yang merupakan variabel dependennya. Seperti halnya dengan uji hipotesis secara simultan, pengambilan keputusan uji hipotesis secara parsial juga didasarkan pada nilai probabilitas yang didapatkan dari hasil pengolahan data melalui program SPSS Statistik Parametrik sebagai berikut :¹⁸

¹⁸Santoso Singgih, “Mengatasi Masalah Statistik dengan SPSS”, (Jakarta: Gramedia, 2004), h.168.

- a) Jika probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima
- b) Jika probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak

Pada uji t, nilai probabilitas dapat dilihat pada hasil pengolahan dari program SPSS pada tabel *coefficients* kolom sig atau *Significance*.

b. Uji F

Uji F ini digunakan untuk menguji apakah variabel independen (X_1 , X_2 , X_3) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y) dari suatu persamaan regresi dengan menggunakan hipotesis statistik. Pengambilan keputusan didasarkan pada nilai probabilitas yang didapatkan dari hasil pengolahan data melalui program SPSS Statistik Parametrik sebagai berikut:

- a) Jika probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak
- b) Jika probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) dari hasil regresi berganda menunjukkan seberapa besar variabel dependen bisa dijelaskan oleh variabel-variabel bebasnya.¹⁹ Dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda maka masing-masing independen yaitu jumlah penduduk, tenaga kerja, dan dana alokasi bantuan pembangunan secara parsial dan secara simultan mempengaruhi variabel dependen yaitu profitabilitas yang dinyatakan dengan R^2 untuk menyatakan koefisien determinasi atau seberapa besar pengaruh variabel jumlah penduduk, tenaga kerja, dan dana alokasi bantuan

¹⁹*Ibid.* h. 167.

pembangunan terhadap ketimpangan pembangunan. Sedangkan r^2 untuk menyatakan koefisien determinasi parsial variabel independen terhadap variabel dependen.

Besarnya koefisien determinasi adalah 0 sampai dengan 1, semakin mendekati 0, maka semakin kecil pula pengaruh semua variabel independent terhadap nilai variabel dependen, (dengan kata lain semakin kecil kemampuan model dalam menjelaskan perubahan nilai variabel dependen). Sedangkan jika koefisien determinasi mendekati 1 maka, dapat dikatakan semakin kuat model tersebut dalam menerangkan variasi variabel terkait. Angka dari R square di dapat dari pengolahan data melalui program SPSS yang bisa dilihat pada tabel model summary kolom R square.

4. Analisis Regresi Linear Berganda

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. regresi linear berganda untuk meramalkan pengaruh dua variabel atau lebih terhadap satu variabel atau untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsional antara dua buah variabel bebas (X) atau lebih dengan sebuah variabel terikat (Y), dimana:²⁰

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

²⁰Usman, Husnaini dan Setiadi, *Pengantar Statistika*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), h.241.

Keterangan:

Y = Ketimpangan Pembangunan Ekonomi

a = Bilangan Konstanta

b_1, b_2, b_3 = Koefisien Regresi

X_1 = Jumlah Penduduk

X_2 = Tenaga Kerja

X_3 = Dana Alokasi Bnatuan Pembangunan

e = Standar error



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Lampung adalah sebuah Provinsi Paling selatan di Pulau Sumatera, Indonesia, ibukotanya terletak di Bandar Lampung. Sebelah utara berbatasan dengan Bengkulu dan Sumatera Selatan, sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Sunda, Sebelah Timur Laut Jawa dan sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia. Provinsi Lampung memiliki pelabuhan nelayan seperti pasar ikan di Teluk Betung, Tarahan dan Kalinda.¹

Visi Provinsi Lampung adalah: (Lampung Maju dan Sejahtera 2019). Sedangkan Misi Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah.
- b. Meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
- c. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, budaya masyarakat, dan toleransi kehidupan beragama.

¹Badan Pusat Statistik, *Publikasi Statistik Lampung*, diakses pada 30 Januari 2018, pukul 07.40 WIB

- d. Meningkatkan pelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- e. Menegakkan supremasi hukum, membangun peradaban demokrasi dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan kompetensi dan profesionalisme ASN.²

2. Sejarah Provinsi Lampung

Provinsi Lampung berdiri pada tanggal 18 Maret 1964 dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 03/1964 kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 14 tahun 1964. Sebelum itu Provinsi Lampung merupakan Keresidenan yang tergabung dengan Provinsi Sumatera Selatan.

Provinsi Lampung sebelum tanggal 18 Maret 1964 tersebut secara administratif masih merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan, namun daerah ini jauh sebelum Indonesia memang telah menunjukkan potensi yang sangat besar serta corak warna kebudayaan tersendiri yang dapat menambah ke khasanahan budaya di Nusantara yang tercinta ini. Oleh karena itu, pada zaman VOC daerah Lampung tidak terlepas dari incaran Penjajahan Belanda.

3. Geografi Provinsi Lampung

Provinsi Lampung memiliki luas 35.376,50 km² dengan Bandar Udara utama adalah “Raden Inten II”, yaitu nama baru dari “Branti”, 28 Km dari Ibukota melalui jalan Negara Menuju Kota Bumi dan Lapangan Terbang AURI terdapat di Menggala

²<http://lampungprov.go.id/page/detail/visi-misi-provinsi-lampung.html>. diakses pada tanggal 18 April 2018, Pukul 08.30 WIB

yang bernama Astra Ksetra. Secara geografi Provinsi Lampung terletak pada kedudukan di antara $105^{\circ}45'$ - $103^{\circ}48'$ BT dan $3^{\circ}45'$ – $6^{\circ}45'$ LS. Daerah ini disebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda dan di sebelah Timur dengan Laut Jawa.

Kawasan bagian barat Provinsi Lampung merupakan daerah pegunungan sebagai rangkaian dari Bukit Barisan. Terdapat tiga buah Gunung yang tingginya lebih dari 2.000m diatas permukaan laut, yaitu Gunung Pesagi di Kabupaten Lampung Barat dengan ketinggian 2.239m, Gunung Tanggamus dengan tinggi 2.102m terletak di Kabupaten Tanggamus dan Gunung Tangkit Tebak dengan tinggi 2.115m terletak di Kabupaten Lampung Utara.

Secara topografi Daerah Lampung dapat dibagi dalam lima unit topografi yaitu: daerah topografis berbukit sampai bergunung, daerah topografis berombak sampai bergelombang, daerah dataran alluvial, daerah dataran rawa pasang surut, daerah river basin. Punggung sebelah barat Lampung adalah bagian dari bukit barisan yang merupakan geantiklinal dengan sinklinal yang terdapat di sebelah timurnya.

Hutan-hutan besar di dataran rendah dapat dikatakan sudah habis dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan pertanian, untuk para transmigran yang terus-menerus memasuki daerah ini. Kayu-kayu hasil hutan di ekspor ke luar negeri. Dari literatur dan Peta Geologi Lampung dapat diketahui adanya bahan-bahan tambang (endapan mineral) diantaranya:

1. Minyak bumi
2. Uranium
3. Batu Bara Muda (*Brown Coal*)

4. Mineral Besi
5. Emas dan Perak
6. Marmer
7. Sumber Air Panas dan Gas Bumi

Lampung terletak di bawah 83 katulistiwa 5° lintang selatan beriklim tropis humid dengan angin laut lembah yang bertiup dari Samudera Indonesia dengan dua musim angin setiap tahunnya.

4. Sektor Ekonomi Provinsi Lampung

Masyarakat pesisir Lampung kebanyakan nelayan, dan bercocok tanam. Sedangkan masyarakat tengah kebanyakan berkebun seperti lada, kopi, cengkeh, kayu manis, dan masih banyak lagi. Provinsi Lampung fokus pada pengembangan lahan bagi perkebunan besar seperti kelapa sawit, karet, padi, singkong, kakao, lada hitam, kopi, jagung, tebu, dan masih banyak lagi. Dan beberapa di daerah pesisir, komoditas perikanan seperti tambak udang lebih menonjol, bahkan untuk tingkat nasional dan internasional.

Selain dari hasil bumi, Provinsi Lampung juga merupakan kota pelabuhan karena Lampung merupakan sebagai pintu gerbang untuk masuk ke Pulau Sumatera. Dari hasil bumi yang melimpah tumbuhlah banyak industri-industri seperti di daerah Pesisir Panjang, daerah Natar, Tanjung Bintang, Bandar Jaya, dan Lain-lainya. Dari semua potensi-potensi yang dimiliki tersebut dapat mempengaruhi perekonomian salah satunya adalah dengan cara meningkatkan iklim untuk dilakukannya investasi tidak hanya pada hasil bumi tapi juga dari sektor-sektor industri yang ada.

B. Analisa Data

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan data-data yang diperoleh berdasarkan metode sampel yaitu *Purposive Sampling*. Dari hasil olah data yang dilakukan dapat dijelaskan mengenai variabel-variabel yang terdapat pada model regresi berganda. Data-data yang diperlukan dalam analisis ini diperoleh terdiri dari tingkat investasi yaitu jumlah penanam modal asing dan penanaman modal dalam negeri, Suku Bunga, Inflasi dan Nilai Tukar Provinsi Lampung.

Berdasarkan data yang diperoleh diharapkan dapat diketahui bagaimana pengaruh variabel Jumlah Penduduk, Tenaga Kerja dan Dana Alokasi Bantuan Pembangunan terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam. Dalam hal ini data yang diperoleh dari laporan tahunan selama lima tahun (2012-2016) yang ada di Badan pusat Statistik Provinsi Lampung.

a. Ketimpangan Pembangunan Ekonomi

Berdasarkan hasil perhitungan ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Lampung dengan menggunakan Indeks Williamson (IW) diperoleh Indeks ketimpangan Pembangunan di Provinsi Lampung tahun 2012-2016 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tingkat Ketimpangan Pembangunan di Provinsi Lampung
Tahun 2012-2016

Tahun	Ketimpangan Pembangunan
2012	0,0008
2013	0,0008
2014	0,0003
2015	0,0008
2016	0,0007
Rata-rata	0,0007

Sumber : Perhitungan dengan Indeks Williamson (IW)

Ketimpangan pembangunan digunakan untuk menganalisis seberapa besar tingkat kesenjangan di provinsi Lampung dengan menggunakan perhitungan Indeks Williamson (IW), nilai angka Indeks yang semakin kecil atau makin merata dan bila semakin jauh dari angka nol menunjukkan ketimpangan yang semakin melebar.

Kriteria untuk mengetahui tingkat ketimpangan adalah sebagai berikut:

- Ketimpangan tinggi jika $IW > 0,5$
- Ketimpangan sedang jika $IW = 0,35-0,5$
- Ketimpangan rendah jika $IW < 0,35$

Berdasarkan tabel 4.1 hasil dari perhitungan ketimpangan pembangunan di Provinsi Lampung menggunakan Indeks Williamson, pada tahun 2012 dan 2013

ketimpangan terjadi sebesar 0,0008 tergolong pada ketimpangan rendah, sedangkan pada tahun 2014, 2015, dan 2016 ketimpangan relatif stabil berada pada angka di bawah 0,0010 yang tergolong masuk kepada ketimpangan rendah. Rata-rata ketimpangan pembangunan Provinsi Lampung dari tahun 2012-2016 sebesar 0,0007 termasuk kedalam ketimpangan rendah menuju ketimpangan sedang.

b. Jumlah Penduduk

Banyaknya jumlah penduduk di suatu daerah dapat mencerminkan pengalokasian anggaran dari Pemerintah Pusat untuk setiap daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing. Pemerintah Daerah yang memiliki jumlah penduduk banyak dituntut untuk melakukan pengendalian intern yang baik sebagai pertanggungjawaban kepada publik. Semakin besar ukuran pemerintahan semakin mudah untuk mendapatkan modal eksternal dalam jumlah yang lebih besar, sehingga investor tertarik untuk menanamkan modalnya pada pemerintahan tersebut. Hal ini dikarenakan setiap pemerintah daerah memiliki ukuran yang berbeda.

Adapun data mengenai Jumlah Penduduk selama tahun 2012-2016 di Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk di Provinsi Lampung
Tahun 2012-2016

Tahun	Jumlah Penduduk / Jiwa
2012	7.767.312
2013	7.932.132
2014	8.026.191
2015	8.117.268
2016	8.205.141

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2012-2016 (diolah)

Berdasarkan data dari 4.2 diatas jumlah penduduk di Provinsi Lampung dalam kurun waktu lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan yang signifikan, dimulai pada tahun 2012 dengan jumlah penduduk mencapai 7.767.312 jiwa dan kemudian pada tahun 2016 jumlah penduduk meningkat dengan 8.205.141 jiwa, jumlah penduduk yang semakin berkembang harus dapat ditekan karena akan mempengaruhi kegiatan perekonomian yang ada apabila jumlah penduduk tidak dapat di kendalikan.

c. Tenaga Kerja

Tenaga kerja sebagai salah satu input untuk faktor produksi. Pentingnya tenaga kerja dalam suatu proses produksi diharapkan dapat meningkatkan produktivitas. Dengan tersedianya tenaga kerja yang berkualitas akan dapat meningkatkan produktivitas, dan produksi akan naik, sehingga laju pertumbuhan juga

akan meningkat. Adapun data tenaga kerja selama tahun 2012-2016 di Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Jumlah Tenaga Kerja di Provinsi Lampung
Tahun 2012-2016

Tahun	Tenaga Kerja
2012	3.449.307
2013	3.471.602
2014	3.673.158
2015	3.635.258
2016	3.931.321

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2012-2016 (diolah)

Berdasarkan data dari Tabel 4.3 diatas jumlah tenaga kerja di Provinsi Lampung dalam kurun waktu lima tahun terakhir jumlah tenaga kerja tertinggi pada tahun 2016 sebesar 3.931.321 jiwa, sedangkan jumlah tenaga kerja terendah pada tahun 2012 sebesar 3.449.307 jiwa. Sehingga dalam kurun 2012-2016 tenaga kerja mengalami peningkatan setiap tahunnya.

d. Dana Alokasi Bantuan Pembangunan

Dalam melaksanakan pembangunan suatu daerah maka diperlukan sumber dana, untuk mencapai keberhasilan dalam pembangunan daerah tersebut bergantung kepada sumber daya yang tersedia pada daerah tersebut. Adapun dana alokasi bantuan pembangunan di Provinsi Lampung dalam kurun waktu 2012-2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Dana Alokasi Bantuan Pembangunan di Provinsi Lampung
Tahun 2012-2016

Tahun	Dana Alokasi Khusus (DAK)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Jumlah DAK & DAU
2012	31.087.640	939.139.287	970.226.927
2013	60.108.230	1.060.663	61.168.893
2014	48.851.620	1.136.053.041	1.184.904.661
2015	245.066.400	1.097.129.439	1.342.195.839
2016	1.651.557.871	1.321.679.032	2.973.236.903

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2012-2016 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.4 diatas Dana Alokasi Bantuan Pembangunan di Provinsi Lampung yang diperoleh dari penjumlahan antara Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus di Provinsi Lampung tahun 2012-2016, dengan demikian dapat dilihat bahwa Pembangunan Provinsi Lampung tahun 2012-2016 tidak merata, hal ini ditunjukkan dengan adanya daerah yang menerima bantuan relatif tinggi dan relatif rendah.

2. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Data yang akan diuji sebelumnya harus memenuhi persyaratan normalitas, pengujian yang digunakan adalah uji *One Sample Kolmogrov-smirnov*. Data yang dinyatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hasil analisis terhadap asumsi normalitas dengan *kolmogrov-smirnov* terhadap nilai residual dari persamaan regresi dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 4.5
Hasil Uji Normalitas

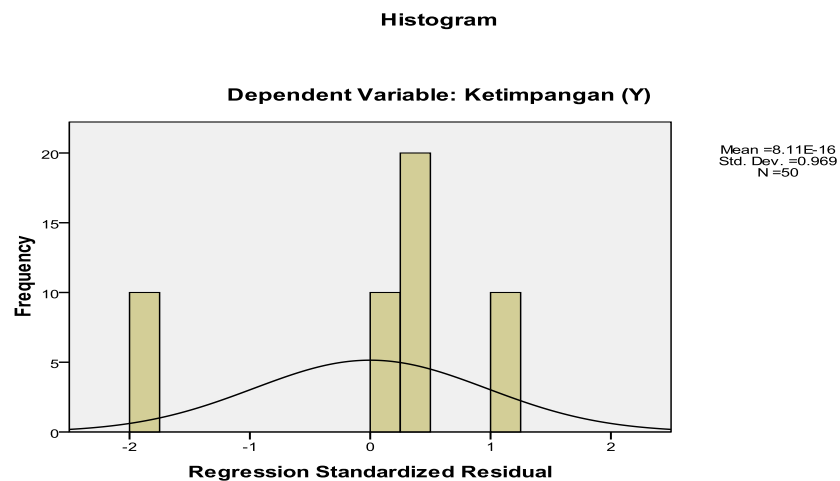
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Predicted Value
N		50
Normal Parameters ^{a,,b}	Mean	25.7708193
	Std. Deviation	.40364485
Most Extreme Differences	Absolute	.101
	Positive	.101
	Negative	-.055
Kolmogorov-Smirnov Z		1.102
Asymp. Sig. (2-tailed)		.678

Sumber : Data Diolah 2018

Hasil uji normalitas pada tabel 4.5 diatas dengan menggunakan metode *one sample kolmogrov-smirnov* menunjukkan bahwa nilai residual dari variabel independen dan variabel dependen pada jumlah (N) sebesar 50 adalah 0.678. Berarti data dari penelitian ini berdistribusi normal karena nilai residualnya lebih besar dari signifikansi 0,05 atau $0,678 > 0,05$. Sehingga model regresi dapat digunakan untuk pengujian hipotesis.

Salah satu cara termudah melihat normalitas resudual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati normal. Berikut ini adalah hasil uji normalitas dengan metode grafik:

Gambar 4.5.1
Grafik Histogram



Hasil uji normalitas dengan grafik histogram pada gambar 4.5.1 diatas menunjukkan bahwa histogram sebagian besar tampak mengikuti kurva normal, sehingga dapat dikatakan bahwa sebaran data tersebut berdistribusi dengan normal.

b. Uji Multikolinearitas

Penelitian ini dilakukan terhadap data bahwa data harus terbebas dari gejala multikolinearitas, gejala ini ditunjukkan dengan korelasi antar variabel independen. Pengujian dalam uji multikolinearitas dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) harus berada di sekitaran 10, hal ini akan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.6
Hasil Pengujian Multikolinearitas

Model	Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)		1.638	.104		
LnJumlah Penduduk (X1)	.099	2.059	.032	.838	1.194
LnTenaga Kerja (X2)	-.300	-3.216	.002	.834	1.200
LnDana Alokasi Bantuan Pembangunan (X3)	.313	3.657	.000	.989	1.011

Sumber: Data diolah 2018

Hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa data yang tidak terjadi gejala multikolinearitas antara masing-masing variabel independen dalam model regresi yaitu melihat nilai VIF dan nilai *tolerance*. Pengambilan keputusan ada tidaknya korelasi antar variabel bebas atau gejala multikolinearitas adalah dengan melihat besaran nilai VIF yang tidak boleh melebihi angka 10 dan nilai *tolerance* harus berada dibawah angka 1. Hasil perhitungan *tolerance* menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan *Variance Inflation Factors* (VIF) juga menunjukkan hal yang sama tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Untuk mendeteksi autokorelasi dalam penelitian ini maka digunakan uji Durbin Watson (DW) berikut ini :

Tabel 4.7
Hasil Pengujian Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.973 ^a	.947	.932	.945	2.176

a. Predictors: (Constant), LnDana Alokasi Bantuan Pembangunan (X3), LnJumlah Penduduk (X1), LnTenaga Kerja (X2)

b. Dependent Variable: Ketimpangan Pembangunan (Y)

Sumber : Data diolah 2018

Pada tabel 4.7 diatas dapat diketahui nilai durbin Watson (d) sebesar 2.176 nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel yang menggunakan signifikansi sebesar 5 %. Jumlah sampel (n) 5 dan jumlah variabel independen (k) adalah 3. Maka dari tabel di dapat nilai $du = 2.6163$, dan nilai $dl = 0.5253$. oleh karena nilai $dl < d < du$ atau $0.5263 < 2.176 < 2.6163$ maka dapat disimpulkan tidak ada autokorelasi negatif.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dan *residual* satu pengamatan yang lain. Jika *Variance* dan

Residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastis dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara memprediksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dengan melakukan analisis korelasi spearman's antara residual dengan masing-masing variabel. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 4.8

Hasil Pengujian Spearman's Rho

Correlations			Jumlah Penduduk (X1)	Tenaga Kerja (X2)	DABP (X3)	Unstandardized Residual
Spearman's rho	LnJumlah Penduduk (X1)	Correlation Coefficient	1.000	.000	.000	.000
		Sig. (2-tailed)	.	1.000	1.000	1.000
		N	50	50	50	50
	LnTenaga Kerja (X2)	Correlation Coefficient	.000	1.000	.574**	.410**
		Sig. (2-tailed)	1.000	.	.000	.030
		N	50	50	50	50
	LnDABP (X3)	Correlation Coefficient	.000	.574**	1.000	.224
		Sig. (2-tailed)	1.000	.000	.	.119
		N	50	50	50	50
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	.000	.410**	.224	1.000
		Sig. (2-tailed)	1.000	.003	.119	.
		N	50	50	50	50

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan hasil output tabel 4.8 diatas dapat diketahui bahwa korelasi Jumlah Penduduk dengan Unstandardized Residual nilai signifikansi sebesar 1.000 dan Tenaga Kerja dengan Unstandardized Residual nilai signifikansi 0,030 dan Dana Alokasi Bantuan Pembangunan dengan Unstandardized Residual nilai signifikansi 0,119, karena signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

3. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji T)

Uji T ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yang terdiri dari Jumlah Penduduk, Tenaga Kerja, dan Dana Alokasi Bantuan Pembangunan di Provinsi Lampung.

Tabel 4.9
Hasil Pengujian Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6.281	5.056		1.638	.104
LnJumlah Penduduk (X1)	.048	.045	.099	2.059	.032
LnTenaga Kerja (X2)	-.197	.061	-.300	-3.216	.002
LnDana Alokasi Bantuan Pembangunan (X3)	1.000	.547	.313	3.657	.000

Sumber : Data diolah 2018

Berdasarkan pengujian regresi secara parsial pada tabel 4.9 diatas menunjukkan bahwa variabel Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Lampung. Variabel Jumlah Penduduk dengan t hitung sebesar 2.059 dan t tabel sebesar 1,67591, $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2.059 > 1.67591$) atau nilai signifikan lebih besar dari α 0.05 % ($0.032 < 0,05$).

Variabel Tenaga Kerja berpengaruh dengan arah negatif terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Lampung. variabel Tenaga Kerja, dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3.216 > 1.67591$) atau nilai signifikan lebih kecil dari α 0.05 ($0.002 < 0.05$).

Variabel Dana Alokasi Bantuan Pembangunan berpengaruh dengan arah positif terhadap investasi di Provinsi Lampung. Variabel Dana Alokasi Bantuan Pembangunan, dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3.657 > 1.67591$) atau nilai signifikan lebih kecil dari α 0.05 ($0.000 < 0.05$).

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen yang terdiri dari jumlah penduduk, tenaga kerja, dan dana alokasi bantuan pembangunan terhadap ketimpangan di Provinsi Lampung secara bersama-sama. Untuk mengetahui signifikan atau tidak pengaruh secara bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat maka digunakan probability sebesar 5% ($=0,05$).

Tabel 4.10
Hasil Pengujian Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	19.389	3	6.463	8.241	.000 ^a
Residual	103.532	46	.893		
Total	122.920	49			

Sumber : Data diolah 2018

Berdasarkan tabel 4.10 diketahui hasil uji signifikan simultan (Uji F) diatas menunjukkan nilai sig. $0.000 < 0.05$, dan nilai F hitung $8.241 > F$ tabel 2,81. Hal ini menunjukkan bahwa:

- a) Jika probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak
- b) Jika probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima

Sehingga dapat ditunjukkan bahwa variabel Jumlah Penduduk, Tenaga Kerja, dan Dana Alokasi Bantuan Pembangunan berpengaruh secara simultan terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi karena probabilitas $0,000 < 0,05$.

4. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) berfungsi untuk melihat sejauh mana keseluruhan variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Apabila angka determinasi semakin kuat, yang berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen. Sedangkan nilai koefisien determinasi (R Square) yang lebih kecil berarti

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen adalah terbatas.

Tabel 4.11
Hasil Pengujian Adjusted R Square

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.973 ^a	.947	.932

Sumber: Data diolah 2018

Dari tabel 4.11 dapat dianalisis pengaruh variabel bebas Jumlah Penduduk, Tenaga Kerja dan Dana Alokasi Bantuan Pembangunan terhadap Ketimpangan Pembangunan, hal ini ditunjukkan oleh koefisien determinai Adjusted R Square sama dengan 0,947 yang artinya adalah besarnya pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel bebas dalam hal ini menjelaskan variabel Ketimpangan Pembangunan sebesar 94.70% sedangkan sisanya 5,30% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimaksud dalam penelitian ini.

5. Analisis Regresi Linear Berganda

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Regresi berganda berguna untuk meramalkan dua variabel predictor atau lebih terhadap satu variabel kriterium atau untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsional antara dua buah variabel bebas (X) atau lebih dengan sebuah

variabel terkait (Y). Analisis regresi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk, Tenaga Kerja dan Dana Alokasi Bantuan Pembangunan di Provinsi Lampung periode 2012-2016.

Formulasi Persamaan regresi berganda sendiri adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Tabel 4.12
Hasil Analisis Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	6.281	5.056	
LnJumlah Penduduk (X1)	.048	.045	.099
LnTenaga Kerja (X2)	-.197	.061	-.300
LnDana Alokasi Bantuan Pembangunan (X3)	1.000	.547	.313

Sumber: Data diolah 2018

$$Y = 6.281 + 0.048 X_1 - 0.197 X_2 + 1.000 X_3 + e$$

Dimana: a = Konstanta

X_1 = Jumlah Penduduk

X_2 = Tenaga Kerja

X_3 = Dana Alokasi Bantuan Pembangunan

Koefisien-koefisien persamaan regresi linear berganda diatas dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta pada persamaan regresi sebesar 6.281 menunjukkan bahwa jika variabel independen lainnya bernilai nol, maka variabel Ketimpangan Pembangunan Ekonomi akan mengalami penurunan sebesar 6.281 satuan.
- b. Koefisien regresi variabel Jumlah Penduduk sebesar 0.048 menunjukkan bahwa jika variabel Jumlah Penduduk meningkat satu satuan maka variabel Ketimpangan Pembangunan Ekonomi mengalami peningkatan sebesar 0.048 satuan dengan ketentuan variabel lainnya konstan.
- c. Koefisien regresi variabel Tenaga Kerja sebesar (-0.0197) menunjukkan bahwa jika variabel Tenaga Kerja menurun satu satuan maka Ketimpangan Pembangunan Ekonomi akan meningkat sebesar 0.0197 satuan. Demikian pula sebaliknya apabila Tenaga Kerja meningkat maka Ketimpangan Pembangunan Ekonomi akan menurun sebesar 0.0197 satuan dengan syarat variabel lainnya konstan.
- d. Koefisien regresi variabel Dana Alokasi Bantuan Pembangunan sebesar 1.000 menunjukkan bahwa jika variabel Dana Alokasi Bantuan Pembangunan meningkat satu satuan maka variabel Ketimpangan

Pembangunan akan mengalami peningkatan sebesar 1.000 satuan dengan ketentuan variabel lainnya konstan.

C. Pembahasan

1. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Lampung.

Pendapatan per kapita yang rendah dan tingkat pembentukan modal yang rendah semakin sulit bagi negara berkembang untuk menopang ledakan jumlah penduduk. Sekalipun *output* meningkat sebagai hasil teknologi yang lebih baik dan pembentukan modal, peningkatan ini akan ditelan oleh jumlah penduduk yang terlalu banyak. Alhasil, tidak ada perbaikan dalam laju pertumbuhan nyata perekonomian. Pada umumnya perkembangan penduduk di negara sedang berkembang sangat tinggi dan besar jumlahnya. Masalah pertumbuhan penduduk bukanlah sekedar masalah jumlah, masalah penduduk juga menyangkut kepentingan pembangunan serta kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. Dalam konteks pembangunan, pandangan terhadap penduduk terpecah dua, ada yang menganggapnya sebagai penghambat pembangunan, ada pula yang menganggap sebagai pemacu pembangunan.

Dari hasil penelitian secara parsial diketahui nilai signifikan untuk variabel X1 (Jumlah Penduduk) sebesar $0.032 > 0.05$. Sehingga dapat disimpulkan jika nilai signifikan > 0.05 maka H_{01} ditolak dan H_1 diterima.

Hipotesis H_1 (Diterima)adalah :

Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi yang ada di Provinsi Lampung

Koefisien regresi variabel suku bunga sebesar 0.048 menunjukkan bahwa jika variabel Jumlah Penduduk meningkat satu satuan maka variabel Ketimpangan Pembangunan Ekonomi mengalami penurunan sebesar 0.048 satuan dengan ketentuan variabel lainnya konstan.

Alasan penduduk dipandang sebagai penghambat pembangunan, dikarenakan jumlah penduduk yang besar dan dengan pertumbuhan yang tinggi, dinilai hanya menambah beban pembangunan. Jumlah penduduk yang besar akan memperkecil pendapatan perkapita dan menimbulkan masalah ketenagakerjaan. Penduduk sebagai pemacu pembangunan karena populasi yang lebih besar sebenarnya adalah pasar potensial yang menjadi sumber permintaan akan berbagai macam barang dan jasa yang kemudian akan menggerakkan berbagai macam kegiatan ekonomi sehingga menciptakan skala ekonomi dalam produksi yang akan menguntungkan semua pihak, menurunkan biaya produksi dan menciptakan sumber pasokan atau penawaran tenaga kerja murah dalam jumlah yang memadai sehingga pada gilirannya akan merangsang output atau produksi agregat yang lebih tinggi lagi.

Pertumbuhan penduduk adalah sebuah proses keseimbangan yang dinamis antara komponen kependudukan yang dapat menambah dan mengurangi jumlah penduduk. Yang menjadi permasalahan dalam pertumbuhan penduduk adalah pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi ini dapat menimbulkan berbagai masalah

dan hambatan dalam pembangunan ekonomi. Dengan keadaan yang demikian di mungkinakan pertumbuhan penduduk akan menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah jika dalam penanganannya tidak bisa dilakukan dengan efektif. David Ricardo berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang terlalu besar hingga 2 kali lipat bisa menyebabkan melimpahnya tenaga kerja. Tenaga kerja yang melimpah menyebabkan upah yang diterima menurun, di mana upah tersebut hanya bisa untuk membiayai tingkat hidup minimum (*subsistence level*). Pada taraf ini, perekonomian mengalami stagnasi (kemandekan) yang disebut *Stationary State*. Dengan keadaan seperti ini akan membuat pertumbuhan perekonomian disuatu wilayah akan melemah.

Realita yang terjadi saat ini adalah bukti, jumlah umat islam yang sangat banyak namun tidak membuat kita sebagai umat islam bangga dengan banyaknya jumlah tersebut dikarenakan jumlah yang banyak tersebut tidak berkontribusi pada pembangunan peradaban yang damai dan sejahtera. Hal ini dapat dilihat pada tabel pertumbuhan jumlah penduduk di Provinsi Lampung dalam kurun waktu lima tahun terakhir :

Tabel 4.13
Jumlah Penduduk di Provinsi Lampung
Tahun 2012-2016

Tahun	Jumlah Penduduk / Jiwa
2012	7.767.312
2013	7.932.132
2014	8.026.191
2015	8.117.268
2016	8.205.141

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2012-2016 (diolah)

Pertambahan jumlah penduduk yang ada di Provinsi Lampung seperti yang terlihat pada tabel 4.13 diatas menunjukkan angka yang signifikan setiap tahunnya, pertambahan jumlah penduduk yang cepat sedangkan tidak dibarengi dengan perekonomian yang stabil. Jika kondisi tersebut tidak ditanggulangi, maka akan dikhawatirkan akan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi yang ada di Provinsi Lampung. Disamping itu, pemerintah akan semakin kewalahan dalam menyediakan berbagai macam fasilitas primer dan sekunder bagi masyarakat dan akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat sendiri.

Dalam upaya menciptakan kesejahteraan penduduk dan untuk mencukupi pemenuhan kebutuhannya, kesejahteraan sendiri mempunyai beberapa aspek yang menjadi indikatornya, di mana salah satunya adalah terpenuhinya kebutuhan seseorang yang bersifat materi, karena harta merupakan salah satu unsur utama dalam

memenuhi kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan dan papan. Hal ini sesuai dengan surat Q.S. At-Takatsur ayat 1-2:

أَلْهَنَكُمْ التَّكَاثُرُ ۖ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۖ

Artinya: “Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Sampai kamu masuk ke dalam kubur”.

Ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa aspek-aspek yang sering dijadikan indikator kesejahteraan seperti tingkat pendapatan (besarnya kekayaan), kepadatan penduduk (jumlah anak), dan lain-lain bisa menipu seseorang jika tidak diiringi dengan pembangunan mental atau moral yang berorientasi pada nilai-nilai ketuhanan. Yang pada gilirannya manusia dikhawatirkan akan terjebak pada persaingan kemewahan duniawi yang serba hedonis, materialistik, dan lalai dari ketaatan dengan demikian penanaman tauhid (pembentukan moral dan mental) merupakan indikator utama bagi kesejahteraan. Allah sendiri telah menjamin kesejahteraan bagi hambanya dan makhluk yang bernyawa sebagaimana yang tersebut dalam Q.S. Surat Hud ayat 6:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۖ

Artinya: “Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh)”.

Al-Ghazali juga menegaskan bahwa harta hanyalah wasilah yang berfungsi sebagai perantara dalam memenuhi kebutuhan, dengan demikian harta bukanlah tujuan final atau sasaran utama manusia di muka bumi ini, melainkan hanya sebagai sarana bagi seorang muslim dalam menjalankan perannya sebagai khalifah di muka bumi di mana seseorang wajib memanfaatkan hartanya dalam rangka mengembangkan segenap potensi manusia dan meningkatkan sisi kemanusiaan manusia di segala bidang, baik pembangunan moral maupun material, untuk kemanfaatan seluruh manusia. Dengan adanya pertambahan jumlah penduduk yang meningkat setiap tahunnya harus cepat ditangani oleh pemerintah agar tidak menimbulkan permasalahan yang sifatnya ekonomi seperti ketimpangan pembangunan yang semakin tinggi.

2. Pengaruh Tenaga Kerja terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Lampung.

Lewis mengemukakan teorinya mengenai ketenagakerjaan, yaitu; kelebihan pekerja merupakan kesempatan dan bukan masalah. Kelebihan pekerja satu sektor akan memberikan andil terhadap pertumbuhan *output* dan penyediaan pekerja di sektor lain. Selanjutnya Lewis mengemukakan bahwa ada dua sektor di dalam perekonomian negara sedang berkembang, yaitu sektor modern dan sektor tradisional. Sektor tradisional tidak hanya berupa sektor pertanian di pedesaan, melainkan juga termasuk sektor informal di perkotaan (pedagang kaki lima, pengecer, pedagang angkringan). Sektor informal mampu menyerap kelebihan tenaga kerja yang ada

selama berlangsungnya proses industrialisasi, sehingga disebut katub pengaman ketenagakerjaan. Dengan terserapnya kelebihan tenaga kerja disektor industri (sektor modern) oleh sektor informal, maka pada suatu saat tingkat upah di pedesaan akan meningkat.

Peningkatan upah ini akan mengurangi perbedaan tingkat pendapatan antara pedesaan dan perkotaan, sehingga kelebihan penawaran pekerja tidak menimbulkan masalah pada pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya kelebihan pekerja justru merupakan modal untuk mengakumulasi pendapatan, dengan asumsi perpindahan tenaga kerja dari sektor tradisional ke sektor modern berjalan lancar dan perpindahan tersebut tidak pernah menjadi terlalu banyak.

Dari hasil penelitian secara parsial diketahui nilai signifikan untuk variabel X_2 (Tenaga Kerja) sebesar $0.002 < 0.05$. sehingga dapat disimpulkan jika nilai signifikan < 0.05 maka H_0 ditolak dan H_2 diterima.

Hipotesis H2 (Diterima) adalah : Tenaga Kerja berpengaruh terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi yang ada di Provinsi Lampung.

Koefisien regresi variabel Tenaga Kerja sebesar (-0.0197) menunjukkan bahwa jika variabel Tenaga Kerja meningkat satu satuan maka Ketimpangan Pembangunan Ekonomi akan menurun sebesar 0.0197 satuan. Demikian pula sebaliknya apabila Tenaga Kerja menurun maka Ketimpangan Pembangunan Ekonomi akan meningkat sebesar 0.0197 satuan dengan syarat variabel lainnya konstan.

Pertambahan jumlah angkatan kerja yang di imbangi dengan kesempatan kerja yang tinggi akan dapat menyerap tenaga kerja yang baru. Penyerapan tenaga kerja ini akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan pada akhirnya akan meningkatkan daya beli masyarakat sehingga permintaan barang dan jasa menjadi lebih besar kemudian mendorong produsen untuk memproduksi lebih banyak lagi dan seterusnya, dengan demikian kegiatan ekonomi akan berjalan dengan baik dan ketimpangan ekonomi akan menurun.

Dalam Islam pemanfaatan tenaga kerja manusia dalam rangka mengefektifkan dan mengaktualisasikan fungsi kekhilafahan dan sekaligus fungsinya sebagai pembangun, sangat dihargai oleh ajaran syariat islam. Sehubungan dengan hal tersebut, manusia sebagai pekerja mutlak mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan aktivitasnya.

Dalam segala kehidupan manusia, maka tuntutan utama adalah mengarahkan dan mencurahkan segala kemampuan fisik maupun yang bersifat non fisik (ide atau pikiran) untuk dapat memenuhi tingkat kehidupan yang lebih baik dan lebih layak. Dengan kata lain, ajaran islam menempatkan manusia sebagai posisi sentral dalam setiap kegiatan, termasuk didalamnya kegiatan perekonomian.

Menurut Imam Syaibani kerja merupakan usaha untuk mendapatkan uang atau harga dengan cara halal. Dalam islam kerja sebagai unsur produksi didasari konsep istikhaf, dimana manusia bertanggung jawab untuk memakmurkan dunia dan juga bertanggungjawab untuk menginvestasikan dan mengembangkan harta yang

diamanatkan Allah SWT untuk menutupi kebutuhan manusia. Berikut ini adalah tenaga kerja yang ada di Provinsi Lampung dalam kurun waktu lima tahun terakhir :

Tabel 4.14
Jumlah Tenaga Kerja di Provinsi Lampung
Tahun 2012-2016

Tahun	Tenaga Kerja
2012	3.449.307
2013	3.471.602
2014	3.673.158
2015	3.635.258
2016	3.931.321

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2012-2016 (diolah)

Masalah ketenagakerjaan yang sering terjadi berhubungan erat dengan masalah pemenuhan kebutuhan, contohnya adalah persoalan ketersediaan lapangan kerja, pengangguran, lemahnya SDM, tuntutan kenaikan upah, tuntutan tunjangan sosial, masalah buruh wanita, dan pekerja di bawah umur. Dengan demikian, tenaga kerja harus memiliki etos kerja yang baik dalam dirinya sehingga mampu mengatasi masalah ketenagakerjaan yang sering terjadi.

Suatu pekerjaan yang tidak dikerjakan dengan ilmu dan keahlian yang benar akan membuat pekerjaan tersebut menjadi rusak dan tidak berkualitas. Yang dimaksud pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang dibolehkan yang tidak bercampur dengan sesuatu yang dilarang dan dapat memberikan dampak positif terhadap pelakunya baik untuk urusan dunianya maupun akhiratnya.

Etos kerja sebagaimana dipahami sebagai akhlak atau semangat kerja yang merupakan ciri khas dan keyakinan seseorang dalam bekerja merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan pekerjaan. Semakin baik etos kerjanya akan semakin baik kualitas hasil kerjanya. Demikian pula dengan orang yang etos kerjanya rendah, akan berdampak terhadap rendahnya kualitas hasil kerja yang dihasilkannya. Selain ditemukannya banyak ayat Alquran yang merincikan tentang pentingnya etos kerja, ternyata tidak sedikit pula hadis-hadis nabi yang menjelaskan permasalahan etos kerja.

Manusia dalam lapangan kehidupannya yang amat luas dan kompleks. Untuk menjamin terlaksananya strategi pemenuhan kebutuhan pokok pangan, sandang, dan papan, maka Islam memerintahkan kepada setiap kepala keluarga untuk bekerja. Barang-barang kebutuhan pokok tidak mungkin diperoleh, kecuali apabila manusia berusaha mencarinya. Islam mendorong manusia agar bekerja, mencari rizki, dan berusaha. Bahkan Islam telah menjadikan hukum mencari rezeki tersebut adalah fardhu. Banyak ayat dan hadits yang telah memberikan dorongan dalam mencari nafkah. Allah SWT berfirman QS. Al-Mulk ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.

3. Pengaruh Dana Alokasi Bantuan Pembangunan Terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Lampung.

Dana alokasi bantuan pembangunan daerah merupakan salah satu sumber keuangan untuk melakukan pembangunan daerah. Pada dasarnya dalam melaksanakan pembangunan diperlukan sumber dana. Untuk mencapai keberhasilan suatu program pembangunan sangat tergantung pada pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Namun potensi dan pemanfaatan sumber daya tersebut bervariasi antar daerah. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Marisa dan Hutabarat serta Nurmanah dalam Hartono (2008) mengidentifikasi bahwa ketimpangan dan variasi distribusi pendapatan mempunyai hubungan yang positif dengan distribusi penguasaan faktor-faktor produksi.

Dengan demikian tidak mengherankan bila keberhasilan pembangunan antar daerah berbeda-beda. Sehingga perlu adanya campur tangan pemerintah pusat untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah, misal dengan memberikan bantuan kepada daerah untuk mempercepat pembangunan daerah. Dana alokasi bantuan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan pengeluaran pembangunan pemerintah pusat ke daerah kabupaten/kota.

Dari hasil penelitian secara parsial diketahui nilai signifikan untuk variabel X3 (Dana Alokasi Bantuan Pembangunan) sebesar $0.000 < 0.05$. Sehingga dapat disimpulkan jika nilai signifikan < 0.05 maka H_0 ditolak dan H_3 diterima.

Hipotesis H3 (Diterima) adalah: Dana Alokasi Bantuan Pembangunan berpengaruh terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi yang ada di Provinsi Lampung.

Koefisien regresi variabel Dana Alokasi Bantuan Pembangunan sebesar 1.000 menunjukkan bahwa jika variabel Dana Alokasi Bantuan Pembangunan meningkat satu satuan maka variabel Ketimpangan Pembangunan Ekonomi akan mengalami peningkatan sebesar 1.000 satuan dengan ketentuan variabel lainnya konstan.

Pada dasarnya dalam melaksanakan pembangunan dibutuhkan sumber dana, untuk mencapai keberhasilan suatu program pembangunan sangat bergantung pada sumber daya yang tersedia, sehingga perlu adanya campur tangan pemerintah pusat untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah, misalnya dengan memberikan bantuan kepada daerah untuk mempercepat pembangunan daerah.

Dana Alokasi Bantuan Pembangunan yang ada di Provinsi Lampung ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya Dana Alokasi Bantuan Pembangunan dalam kurun waktu lima terakhir:

Tabel 4.15
Dana Alokasi Bantuan Pembangunan di Provinsi Lampung
Tahun 2012-2016

	Dana Alokasi	Dana Alokasi	Jumlah	DAK &
Tahun	Khusus (DAK)	Umum (DAU)	DAU	
2012	31.087.640	939.139.287	970.226.927	
2013	60.108.230	1.060.663	61.168.893	
2014	48.851.620	1.136.053.041	1.184.904.661	
2015	245.066.400	1.097.129.439	1.342.195.839	
2016	1.651.557.871	1.321.679.032	2.973.236.903	

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2012-2016 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.15 diatas Dana Alokasi Bantuan Pembangunan di Provinsi Lampung yang diperoleh dari penjumlahan antara Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus di Provinsi Lampung tahun 2012-2016, mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya, yang menunjukkan bahwa pemerintah ingin mengembangkan pembangunan ekonomi yang ada.

Dari penjelasan diatas dapat dijelaskan pula bahwa kebijakan pemerintah dalam alokasi Dana Alokasi Bantuan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat lebih diorientasikan ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah DAU mapun DAU yang secara persentase menunjukkan trend yang positif, yang ini secara tidak langsung juga sejalan dengan tujuan pembangunan dalam ekonomi islam itu sendiri. Selain itu dalam suatu perekonomian peran pemerintah sangat diperlukan dengan pengaturan antara pendapatan dan pengeluaranya yang ditunjukkan untuk kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah Provinsi Lampung harus dapat lebih

mengelola Dana Alokasi Bantuan Pembangunan dan menyalurkannya kepada daerah yang membutuhkan pembangunan ekonomi dengan dana yang besar, dengan begitu kegiatan perekonomian akan produktif dan pembangunan ekonomi akan menjadi lebih baik sehingga ketimpangan pembangunan ekonomi dapat lebih rendah antar daerahnya.

Dalam suatu perekonomian peran pemerintah sangat diperlukan dengan pengaturan antara pendapatan dan pengeluarannya yang ditunjukkan untuk kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah Provinsi Lampung harus dapat mengelola sumber daya yang ada dan sumber pembiayaannya melalui anggaran Dana Alokasi Bantuan Pembangunan ke pengeluaran yang dapat menggerakkan perekonomian, bantuan sosial yang lebih produktif dan berorientasi pada pembangunan ekonomi yang lebih baik.

Kebijakan distribusi yang ditawarkan ekonomi Islam dengan tidak berpihak hanya pada salah satu agen ekonomi, dan diperkuat dengan prinsip-prinsip yang jelas memberikan arahan bahwa keadilan ekonomi harus ditegakkan. Namun menciptakan keadilan ekonomi akan sulit terwujud jika tidak melibatkan peran institusi yang ada seperti halnya pemerintah dan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan Q.S. At-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”*.

Islam mengajarkan agar harta tidak menumpuk pada golongan tertentu di masyarakat dan mendorong terciptanya pemerataan dengan tidak berpihak pada satu kelompok atau golongan tertentu, sehingga proses distribusi dapat berjalan dengan adil. Ini dapat dilakukan dengan memberikan peluang yang sama bagi masyarakat untuk mendapatkan harta kekayaan, dan mewajibkan bagi yang mendapatkan harta berlebih untuk mengeluarkan zakat sebagai kompensasi bagi pensucian dan pembersihan harta tersebut atas hak orang lain. Pemerataan distribusi merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan keadilan, karena Islam menghendaki kesamaan pada manusia dalam memperoleh peluang untuk mendapatkan harta kekayaan tanpa memandang perbedaan kasta maupun warna kulit. Dari mereka yang lebih beruntung dikenakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta mereka bagi saudara-saudaranya yang kurang beruntung sehingga redistribusi kekayaan dapat berjalan, serta akan menciptakan pemerataan pendapatan di masyarakat.

4. Pengaruh Jumlah Penduduk, Tenaga Kerja dan Dana Alokasi Bantuan Pembangunan secara Simultan.

Dari hasil penelitian yang diperoleh melalui analisa secara kuantitatif, menunjukkan bahwa dari ke tiga variabel yang diteliti yaitu tiga variabel independen (Jumlah Penduduk, Tenaga Kerja dan Dana Alokasi Bantuan Pembangunan) dan satu

variabel dependen (Ketimpangan Pembangunan Ekonomi) berpengaruh secara simultan hal ini ditunjukkan dengan Uji F yang memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 atau nilai signifikansi $0.000 < 0.05$, yang berarti H_0 ditolak dan H_4 diterima.

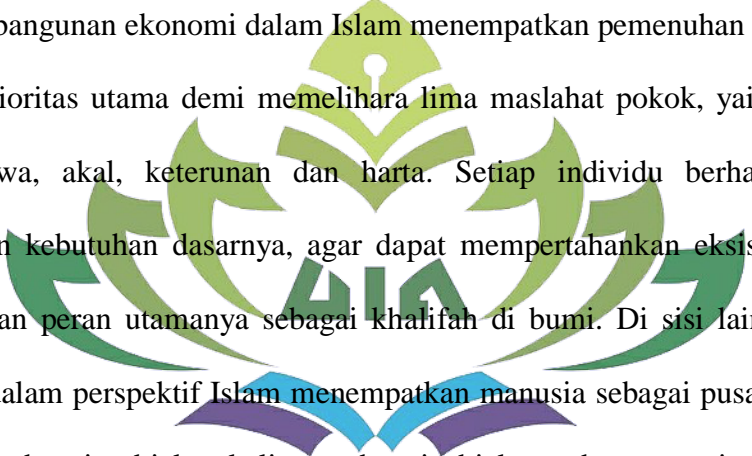
Hipotesis H4 (Diterima) adalah: Jumlah Penduduk, Tenaga Kerja dan Dana Alokasi Bantuan Pembangunan berpengaruh terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi yang ada di Provinsi Lampung.

Hal ini berarti Ketimpangan Pembangunan Ekonomi dipengaruhi oleh tiga faktor atau variabel tersebut. Peningkatan jumlah penduduk, tenaga kerja dan Dana alokasi bantuan pembangunan berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi dan kemakmuran penduduk akan menyebabkan ledakan jumlah penduduk yang terus meningkat sehingga dengan adanya peningkatan jumlah penduduk akan menaikkan tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi suatu daerah.

5. Ketimpangan Pembangunan Ekonomi dalam perspektif Ekonomi Islam.

Suatu tantangan besar yang dihadapi oleh umat Islam saat ini adalah bagaimana membangun ekonominya selaras dengan ideologi agamanya. Beberapa daerah umumnya tengah menderita akibat ketimpangan ekonomi, hal ini juga yang dialami Provinsi Lampung. Tidak optimalnya pemanfaatan sumber daya manusia, fisik dan alam yang dimiliki suatu daerah akan berakibat terjadinya kemiskinan, keterbelakangan dan stagnasi ekonomi. Meskipun Provinsi Lampung kaya akan sumber daya namun kondisi ekonominya kurang berkembang. Hal tersebut dapat kita

lihat pada tabel PDRB Kabupaten/Kota terlampir yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung berfluktuatif. Dapat digaris bawahi bahwa standar hidup rata-rata penduduknya masih rendah, bahkan realitas yang memprihatinkan adalah pembangunan dan eksploitasi sumber daya ekonomi hanya dinikmati oleh sekelompok tertentu saja dari masyarakatnya. Hal ini dapat terjadi dikarenakan konsentrasi ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang tidak merata.



Pembangunan ekonomi dalam Islam menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar sebagai prioritas utama demi memelihara lima maslahat pokok, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap individu berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasarnya, agar dapat mempertahankan eksistensi hidup dan menjalankan peran utamanya sebagai khalifah di bumi. Di sisi lain, pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan, bertindak sebagai subjek sekaligus sebagai objek pembangunan itu sendiri. Hal ini didasari oleh pandangan dunia Islam yang menempatkan manusia sebagai pelaku utama dalam kehidupan manusia.

Sebenarnya konsep pembangunan ekonomi Islam bertolak dari pengembangan sumber daya manusia (*human capital*) dan penguasaan teknologi sebagai penggerak utama (*driving force*) pembangunan ekonomi. Pengembangan sumber daya manusia merangkum seluruh potensi dan keberdayaan dan kualitas manusia dari sudut materi, spiritual dan moral. Pembangunan ekonomi merangkum pembangunan sistem keuangan dan dasar perniagaan secara adil.

Fokus dan inti utama pembangunan dalam Islam adalah pembangunan manusia itu sendiri termasuk aspek sosial dan budayanya. Ini berarti Islam menganggap diri manusia sendirilah yang merupakan tempat sebenarnya aktivitas pembangunan itu. Pemikiran ini berangkat dari pandangan Islam yang menempatkan manusia sebagai khalifah yang diamanahkan oleh Allah untuk mengelola bumi sesuai dengan kehendak-Nya (syariat Islam) yang pada suatu saat nanti (di akhirat) akan diminta pertanggungjawaban atas pembangunan (amalan) yang telah dilakukannya. Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah SWT:


 وَالْحَرُومِ لِلسَّائِلِ حَقُّ أَمْوَالِهِمْ وَفِي

Artinya : *“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”* (QS. Ad-Dzariat: 19).

Pertumbuhan ekonomi sangat diperlukan untuk menanggulangi ketimpangan yang terjadi di Provinsi Lampung. Anjuran Islam terhadap kegiatan ekonomi bukan hanya untuk mengakumulasi modal, tetapi semata-mata untuk kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Kemiskinan membuat individu tidak dapat menjalankan kewajiban pribadi, sosial dan moralnya, oleh karena itu setiap manusia dianjurkan untuk selalu berdoa untuk dihindarkan dari kemiskinan, kekurangan dan kehinaan. Bahkan kemiskinan akan mengantarkan kepada kakufuran.

Pemerintah Provinsi Lampung memiliki posisi yang sangat penting dalam menciptakan keadilan ekonomi. Pemerintah, sebagai pemegang amanah Allah,

memiliki tugas bersama dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan, karena salah satu unsur penting dalam menciptakan kesejahteraan ialah mewujudkan pemerintahan yang adil. Pemerintah dan masyarakat selaku pelaku ekonomi bahwa terciptanya keadilan ekonomi merupakan tanggung jawab bersama. Ketika pemerintah dan masyarakat tersebut bekerja bersama menjalankan perekonomian dengan baik, diharapkan keadilan, kesejahteraan akan tercipta untuk memberi dampak pada tersebarnya harta secara adil di masyarakat yang akan menggerakkan ekonomi rakyat dan mengentaskan dari ketimpangan yang terjadi pada suatu daerah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada penelitian diatas, maka dihasilkan kesimpulan bahwa sebagai berikut :

1. Variabel Jumlah Penduduk berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Lampung dengan menggunakan alat analisis Regresi Linear berganda secara parsial menghasilkan bahwa t hitung lebih besar dari t tabel ($2,059 > 1,675$) serta nilai sig. ($0.032 < 0,05$).
2. Variabel Tenaga Kerja berpengaruh dengan arah negatif terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Lampung dengan nilai t hitung lebih kecil dari t tabel ($-3,21 < 1,675$) serta nilai sig. ($0,002 < 0.005$).
3. Variabel Dana Alokasi Bantuan Pembangunan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Lampung dengan nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($3,657 > 1,675$) serta nilai sig. ($0,000 < 0,05$).
4. Dalam pandangan sistem ekonomi Islam, buruknya distribusi kekayaan di tengah masyarakat itulah yang membuat timbulnya kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Isu-isu ketimpangan pendistribusian pendapatan dan kekayaan di Indonesia, kritik terhadap distribusi dalam ekonomi kapitalis dan diakhiri dengan

telaah terhadap distribusi ekonomi Islam dalam mewujudkan keadilan distributif serta mekanisme distribusi dalam Islam sebagai solusi menuju keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Keadilan distributif adalah prinsip utama dalam ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian harus didasarkan pada dua sendi, yaitu kebebasan dan keadilan.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan diatas maka dapat diberikan saran terhadap hasil penemuan ini yaitu :

1. Pemerintah harus mampu menekan jumlah ledakan penduduk demi menjaga stabilitas perekonomian yang ada dan lebih meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, IPM, yang pada akhirnya masalah kemiskinan akan turun secara signifikan.
2. Pemerintah harus mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat serta menerapkan kebijakan yang dapat mendorong masyarakat untuk mampu menjadi wirausaha mandiri agar mereka dapat mengentaskan kemiskinan keluarganya serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
3. Dengan adanya ketimpangan pembangunan antar daerah memberikan indikasi bahwa dana alokasi bantuan pembangunan dari pemerintah pusat sangatlah penting. Seharusnya dana alokasi pembangunan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah hendaknya disesuaikan dengan situasi maupun kondisi masing-masing daerah, sehingga diharapkan daerah yang tertinggal mampu mengejar daerah yang sudah maju.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita Rahardjo. *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu 2013.
- Aedy Hasan, *Etika Dan Bisnis Islam Teori Dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Andriani Evi, Sri Indah Handayani. Pengaruh PDRB Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merangin. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol.8 No.2. 2008.
- Arsyad Lincoln. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2015.
- Atmaja Lukas Setia. *Statistik Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: ANDI. 2011.
- Badan Pusat Statistik. *Publikasi Statistik Lampung*, diakses pada 25 Januari 2018, pukul 07.40 WIB.
- Bumantara Syarif Lyra. Faktot-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Ketimpangan Ekonomi Antar Wilayah. Tersedia di <https://www.scribd.com/doc/147273102/Summary-Pendapat-Ahli-TtgPenyebab-Ketimpangan-Wilayah>,(on-Line) tanggal 10 April 2018.
- Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Revisi*. Surabaya: Cv Mahkota. 1996.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta: PT Gramedia. 2011.
- Devita Andri, Arman Delis, Junaidi. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi". *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*. Vol. 2, No. 2. 2014.
- Dewi Kadek Rosita, Putu Kepramareni, Ni Luh Gde Novitasari. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota Se-Bali (Periode Tahun 2012-2015). *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. 7 No.1. 2017.

- Hadi Sutrisno. *Metode Reasearch*. Yogyakarta: ANDI. 2002.
- Hariwijaya dan Triton, *Pedoman Penulisan Ilmiah Proposal dan Skripsi*. Yogyakarta: Tugu Publisher. 2008.
- Hartono Budiantoro. Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Di Provinsi Jawa Tengah. *Tesis*. Program Pasca Sarjana UNDIP. Semarang. 2008.
- Haryanto Sugeng. Analisis Pengaruh PAD, DAU Dan DAK Terhadap Belanja Modal Dan Belanja Barang Dan Jasa Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2006-2012. *Jurnal Modernisasi*. Vol. 9, No. 2. 2013.
- Hasan Iqbal. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara. 2008.
- Huda Nurul, *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.
- Huda Nurul, Et. Al, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Idris Kamal, Syaparuddin, Siti Hodijah. Perumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja, Kemiskinan, dan Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*. Vol. 9, No. 2014.
- Iqbal Muhammad, Amries Rusli Tanjung, Supriono. Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Belanja Modal, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pada Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Dan Kota Provinsi Riau Dan Sumatera Barat. *JOM Fekom*, Vol. 4 No. 1. 2017.
- Iqbal Muhammad. Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Belanja Modal, an Jumlah Penduduk Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pada Pemerintah Daerah. *Jurnal JOM Fekon*, Vol. 4, No. 1. 2017.
- Iswanto Denny. Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Propinsi Jawa Timur. *Jurnal Yayasan Al-Kahfi Tangerang Selatan*, Vol. 4, No. 1. 2015.
- Kuncoro Mudrajat. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga 2004.
- Manululang Sendjun H. *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Citra. 1998.

- Mulyadi. *Ekonomi Sumberdaya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada 2014.
- Munthe Marabon. Konsep Distribusi Dalam Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah STEI Annisa Pekanbaru*. 2014.
- Nasution, M. Thoib, Etos Kerja Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ihtiyadh*, Vol. 1, No. 1, 2017.
- Putri Rizka Mardela Okta. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Lampung*. Skripsi. Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Lampung. 2016.
- Rahmawati Anita. Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif. *Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus*. 2013.
- Rivai Veithzal. *Islamic Economics, Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Rumbia Wali Ayu. Proyeksi Penduduk Berlipat Ganda Di Kota Bau-Bau. *Jurnal Ekonomi Pembangunan FE-Unhalu*. Vol. 2, No. 1. 2008.
- Singgih Santoso. *Mengatasi Masalah Statistik dengan SPSS*. Jakarta: Gramedia. 2004.
- Sobita Nindya Eka, I Wayan Suparta. *Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Lampung*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 3, No. 2. 2014.
- Sodiq Amirus, "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam". *Jurnal Equilibrium*, Vol 3, No. 2, 2015.
- Subagyo Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2011.
- Subandi. *Ekonomi Pembangunan*. Bandung, Alfa Beta 2014.
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Pendekatan Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Sujarweni V. Wiratna. *SPSS Untuk Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Pers. 2015.
- Sujarweni Wiratna. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2015.

- Sukirno Sadono. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Bima Grafika 2001.
- Sukirno Sadono. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan Edisi 2*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Suprianto, Binar Dwiyanto Pamungkas, Julia Zikriana. *Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2010-2015. Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 14, No. 2. 2017.
- Syarif Lyra Bumantara, Faktot-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Ketimpangan Ekonomi Antar Wilayah, tersedia di: <https://www.scribd.com/doc/147273102/Summary-Pendapat-Ahli-Ttg-Penyebab-Ketimpangan-Wilayah>, (on-Line) tanggal 10 April 2018.
- Syauqi Irfan. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2016.
- Tarigan Robinson. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara 2004.
- Todaro Michael P, Stephen C. Smith. *Pembangunan Ekonomi Edisi 11*. Jakarta: Erlangga 2011.
- Todaro Michael P. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi 7*. Jakarta: Erlangga 2000.
- Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja.
- Usman, Husnaini dan Setiadi, *Pengantar Statistika*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2003.
- Zebua Widya Ningsih. Djaimi Bakce, Syaiful Hadi. Analisis Faktor-Faktor Dominan Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Riau. *Jurnal Agribisnis Ekonomi*. Vol. 6, No. 2. 2015.
- Zuriah Nurul. *Metode Penelitian Sosial, dan Pendidikan Teori-Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Lampiran 1. Perhitungan Indeks Williamson Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2012

Nama Kabupaten	Yi	Fi	N	Yi-y	(Yi-y) ²	Fi/n	(Yi-y) ² *Fi/n	Akar (Yi-y) ² *Fi/n	IW
	PDRB Perkapita	Penduduk Kab/Kota	Penduduk Provinsi						
Lampung Barat	13.210,39	427773	7.767.312	-212.412,55	4,5119	0,055	2481,545	172,745504	0,0008
Tanggamus	14.913,74	548728	7.767.312	-210.709,20	4,4398	0,0706	3134,4988		
Lampung Selatan	24.424,70	932552	7.767.312	-201.198,24	4,048	0,12	485,76		
Lampung Timur	24.249,46	968004	7.767.312	-201.373,48	4,0551	0,1246	5052,6546		
Lampung Utara	20.969,47	594562	7.767.312	-204.653,47	4,1883	0,0765	3204,0495		
Way Kanan	17.881,72	415078	7.767.312	-207.741,22	4,3156	0,0537	2317,4772		
Tulang Bawang	28.753,15	410725	7.767.312	-196.869,79	3,8757	0,0528	2046,3696		
Bandar Lampung	30.063,50	902885	7.767.312	-195.559,44	3,8243	0,1162	4443,8366		
Metro	21.118,46	149361	7.767.312	-204.504,48	4,1822	0,0192	802,9824		
Lampung Tengah	30.038,35	1192958	7.767.312	-195.584,59	3,8253	0,1535	5871,8355		
Y	225.622,94						29841,0092		

Lampiran 2. Perhitungan Indeks Williamson Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2013

Nama Kabupaten	Yi	Fi	N	Yi-y	(Yi-y) ²	Fi/n	(Yi-y) ² *Fi/n	Akar (Yi-y) ² *Fi/n	IW
	PDRB Perkapita	Penduduk Kab/Kota	Penduduk Provinsi						
Lampung Barat	14.452,54	287588	7.932.132	-205.261,46	4,2132	0,0363	1527,5411	175,349853	0,0008
Tanggamus	16.133,24	560322	7.932.132	-203.580,76	4,1445	0,0706	2927,65		
Lampung Selatan	26.555,78	950844	7.932.132	-193.158,22	3,731	0,1199	4472,63		
Lampung Timur	27.086,62	988277	7.932.132	-192.627,38	3,7105	0,1245	4622,97		
Lampung Utara	22.768,76	598924	7.932.132	-196.945,24	3,8787	0,0755	2928,65		
Way Kanan	19.158,23	423125	7.932.132	-200.555,77	4,0222	0,0533	2145,57		
Tulang Bawang	31.745,87	417782	7.932.132	-187.968,13	3,5332	0,0526	1860,92		
Bandar Lampung	32.770,59	942039	7.932.132	-186.943,41	3,4947	0,1187	4150,39		
Metro	23.013,79	153517	7.932.132	-196.700,21	3,869	0,0193	748,78		
Lampung Tengah	32.584,36	1214720	7.932.132	-187.129,64	3,5017	0,1531	5362,47		
Y	219.714,00						30747,5711		

Lampiran 3. Perhitungan Indeks Williamson Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2014

Nama Kabupaten	Yi	Fi	N	Yi-y	(Yi-y) ²	Fi/n	(Yi-y) ² *Fi/n	Akar (Yi-y) ² *Fi/n	IW
	PDRB Perkapita	Penduduk Kab/Kota	Penduduk Provinsi						
Lampung Barat	16.041,05	290388	8.026.191	-522.192,96	2,7269	0,0362	986,6	159,286503	0,0003
Tanggamus	17.986,99	567172	8.026.191	-520.247,02	2,7066	0,0707	1912,62		
Lampung Selatan	293.888,90	961897	8.026.191	-244.345,11	5,9705	0,1198	7155,33		
Lampung Timur	29.573,92	998720	8.026.191	-508.660,09	2,5874	0,1244	3219,57		
Lampung Utara	25.535,80	602727	8.026.191	-512.698,21	2,6286	0,0751	1973,95		
Way Kanan	21.392,14	428097	8.026.191	-516.841,87	2,6713	0,0533	1424,8		
Tulang Bawang	35.259,41	423710	8.026.191	-502.974,60	2,5298	0,0528	1335,5		
Bandar Lampung	36.771,14	960695	8.026.191	-501.462,87	2,5147	0,1197	3009,97		
Metro	25.639,52	155992	8.026.191	-512.594,49	2,6275	0,019	499,46		
Lampung Tengah	36.145,14	1227185	8.026.191	-502.088,87	2,5209	0,1529	3854,39		
Y	538.234,01						25372,19		

Lampiran 4. Perhitungan Indeks Williamson Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2015

Nama Kabupaten	Yi	Fi	N	Yi-y	(Yi-y) ²	Fi/n	(Yi-y) ² *Fi/n	Akar (Yi-y) ² *Fi/n	IW
	PDRB Perkapita	Penduduk Kab/Kota	Penduduk Provinsi						
Lampung Barat	17.493,08	293105	8.117.268	-278.531,10	7,758	0,0361	2801,32	233,306901	0,0008
Tanggamus	19.394,13	573904	8.117.268	-276.630,05	7,6524	0,0707	5410,37		
Lampung Selatan	32.298,44	972579	8.117.268	-263.725,74	6,9551	0,1198	8333,33		
Lampung Timur	30.379,62	1008797	8.117.268	-265.644,56	7,0567	0,1243	8769,92		
Lampung Utara	27.786,73	606092	8.117.268	-268.237,45	7,1951	0,0747	5372,36		
Way Kanan	23.244,79	432914	8.117.268	-272.779,39	7,4409	0,0533	3968,42		
Tulang Bawang	37.703,10	429515	8.117.268	-258.321,08	6,673	0,0529	353,09		
Bandar Lampung	40.262,89	979287	8.117.268	-255.761,29	6,5414	0,1219	7972,29		
Metro	28.014,60	158415	8.117.268	-268.009,58	7,1829	0,0195	1401,8		
Lampung Tengah	39.446,80	1239096	8.117.268	-256.557,38	6,5832	0,1526	10049,21		
Y	296.024,18						54432,11		

Lampiran 5. Perhitungan Indeks Williamson Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2016

Nama Kabupaten	Yi	Fi	N	Yi-y	(Yi-y) ²	Fi/n	(Yi-y) ² *Fi/n	Akar (Yi-y) ² *Fi/n	IW
	PDRB Perkapita	Penduduk Kab/Kota	Penduduk Provinsi						
Lampung Barat	19.083,92	295689	8.025.141	-262.292,89	6,881	0,0368	2535,33	209,184679	0,0007
Tanggamus	21.241,67	580383	8.025.141	-260.135,14	6,767	0,0723	4893,93		
Lampung Selatan	35.511,43	982885	8.025.141	-245.865,38	6,045	0,1225	7403,66		
Lampung Timur	32.188,08	1018424	8.025.141	-249.188,73	6,2095	0,1269	7880,16		
Lampung Utara	30.785,92	609304	8.025.141	-250.590,89	6,2796	0,0759	4767,75		
Way Kanan	25.279,90	437530	8.025.141	-256.096,91	6,5586	0,0545	3575,74		
Tulang Bawang	41.349,20	435125	8.025.141	-240.027,61	5,7613	0,0542	3123,79		
Bandar Lampung	44.843,79	997728	8.025.141	-236.533,02	5,5948	0,1243	6955,75		
Metro	31.092,90	160729	8.025.141	-250.283,91	6,2642	0,02	1254,61		
Lampung Tengah	44.121,30	1250486	8.025.141	-237.255,51	5,629	0,1558	8771,17		
Y	281.376,81						43758,23		

DATA INPUT SPSS

Tahun	JP (X1)	Ln JP	TK (X2)	Ln TK	DABP (X3)	Ln DABP	KP (Y)
2012	427773	13	3449307	15	64681795	18	8
	548728	13	3449307	15	64681795	18	8
	932552	14	3449307	15	64681795	18	8
	968004	14	3449307	15	64681795	18	8
	594562	13	3449307	15	64681795	18	8
	415078	13	3449307	15	64681795	18	8
	410725	13	3449307	15	64681795	18	8
	902885	14	3449307	15	64681795	18	8
	149361	12	3449307	15	64681795	18	8
	1192958	14	3449307	15	64681795	18	8
2013	287588	13	449307	13	4077924	15	8
	560322	13	449307	13	4077924	15	8
	950844	14	449307	13	4077924	15	8
	988277	14	449307	13	4077924	15	8
	598924	13	449307	13	4077924	15	8
	423195	13	449307	13	4077924	15	8
	417782	13	449307	13	4077924	15	8
	942039	14	449307	13	4077924	15	8
	153517	12	449307	13	4077924	15	8
	1214720	14	449307	13	4077924	15	8
2014	290388	13	36731589	17	78993644	18	3
	567172	13	36731589	17	78993644	18	3
	961897	14	36731589	17	78993644	18	3
	998720	14	36731589	17	78993644	18	3
	602727	13	36731589	17	78993644	18	3
	428097	13	36731589	17	78993644	18	3

	423710	13	36731589	17	78993644	18	3
	960965	14	36731589	17	78993644	18	3
	155992	12	36731589	17	78993644	18	3
	1227185	14	36731589	17	78993644	18	3
2015	293105	13	45679979	18	89479723	18	8
	573904	13	45679979	18	89479723	18	8
	972579	14	45679979	18	89479723	18	8
	1008797	14	45679979	18	89479723	18	8
	606092	13	45679979	18	89479723	18	8
	432914	13	45679979	18	89479723	18	8
	429515	13	45679979	18	89479723	18	8
	979287	14	45679979	18	89479723	18	8
	158415	12	45679979	18	89479723	18	8
	1239096	14	45679979	18	89479723	18	8
2016	295689	13	39548688	17	198215794	19	7
	580383	13	39548688	17	198215794	19	7
	982885	14	39548688	17	198215794	19	7
	1018424	14	39548688	17	198215794	19	7
	609304	13	39548688	17	198215794	19	7
	437530	13	39548688	17	198215794	19	7
	435125	13	39548688	17	198215794	19	7
	997728	14	39548688	17	198215794	19	7
	160729	12	39548688	17	198215794	19	7
	1250486	14	39548688	17	198215794	19	7